



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT  
KOMISI IX DPR RI**

---

Tahun Sidang : 2014-2015  
Masa Persidangan : I  
Rapat Ke- : -  
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat Umum  
Dengan : 1. Ketua KSPI;  
2. Ketua Migrant Care.  
Sifat Rapat : Terbuka  
Hari/tanggal : Rabu, 19 November 2014  
Waktu : Pukul 10.00 WIB - selesai  
Acara : Masukan terkait permasalahan  
ketenagakerjaan.  
Ketua Rapat : Dede Yusuf Macan Effendi, ST, M.Si/Ketua  
Komisi IX DPR RI.  
Sekretaris Rapat : Dra.Tri Udiartiningrum/Kabag Set Komisi IX  
DPR RI  
Tempat : Ruang Rapat Komisi IX DPR RI, Lantai 1  
Gedung Nusantara I,  
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Pusat  
Hadir Anggota : A. 19 orang dari 33 orang Anggota Komisi IX  
DPR RI;  
B. Ketua KSPI beserta jajaran;  
C. Ketua Migrant Care beserta jajaran.

**HADIR :**

**PIMPINAN KOMISI IX DPR RI :**

1. Dede Yusuf Macan Effendi, S.T., M.Si.
2. Pius Lustrilanang, S.IP. M.Si,

**F.PDIP :**

-

**F.PG :**

3. Hj. Dewi Asmara, SH, MH

**F.P.GERINDRA :**

4. Khaidir
5. dr. H. Suir Syam, M. Kes.
6. Susi Marleny Bachsin, SE, MM.
7. Drg. Putih Sari.

**F.PD :**

8. dr. Verna Gladies Merry Inkiriwang
9. Siti Mufattahah, Psi.
10. Drs. Ayub Khan.
11. Drs. H. Zulfikar Achmad.
12. Hj. Aliyah Mustika, SE.

**F.PAN :**

13. Ir, H. A. Risiki Sadig.
14. Dr. H.M. Ali Taher Parasong, SH, M.Hum.

**F.PKB :**

-

**F.PKS :**

15. Anshory Siregar, Lc
16. Drs. H. Hamid Noor Yasin, MM.

**F.PPP :**

-

**F.P.NASDEM :**

17. Irma Suryani Chaniago
18. Drg. Hj. Yayuk Srirahayu Ningsih, MM, MH.
19. Amelia Anggraini.

**F.P.HANURA :**

-

**ANGGOTA IZIN/SAKIT :**

1. Hj. Saniatul Lativa (F. PG)
2. Drs. H. Chaerul Anwar, Apt (F.PKS).

**UNDANGAN :**

1. Sekjen KSPI beserta jajaran
2. Migrant care

**KETUA RAPAT (DEDE YUSUF MACAN EFFENDI, ST / F.PD) :**

*Bismillahirrahmanirrahim.*

*Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.*

Selamat pagi, dan

Salam sejahtera bagi kita semua.

Teman-teman dari Anggota Komisi IX yang sudah hadir dan juga wabil khusus kepada Teman-teman dari Nasdem ataupun PPP yang hari ini akan hadir bersama dengan kita.

Yang saya hormati Teman-teman dari KSPI dan dari Migrant Care.

Terima kasih.

Pagi hari ini kita sudah berkumpul bersama dan sebelumnya saya memohon maaf karena hari ini mungkin Anggota belum semua hadir dan kita juga masih menunggu beberapa tamu-tamu yang lain. Oleh karena itu, izinkan saya untuk kita buka dulu lalu nanti kita skors ya sambil menunggu ya?

Baik.

**Bapak-bapak/Ibu-ibu,**

Atas seizin dari semua Teman-teman Anggota Komisi IX dan para tamu, maka sidang pagi hari ini, Sidang RDPU dengan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Migrant Care saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

**(RAPAT : DIBUKA PKL 10.30 WIB)**

Dan sesuai dengan Tata Tertib karena kita masih menunggu beberapa teman dan anggota-anggota yang lain juga para tamu undangan, untuk itu kami berikan waktu untuk kita skors 5 menit, ya kita skors 5 menit dahulu sambil nanti kita lanjutkan kembali.

Setuju?

**(RAPAT : DISKORS)**

Baik.

**Bapak-bapak/Ibu-ibu yang saya hormati,**

Kita sudah melewati 5 menit, skors kita cabut, setuju?

**(SKORS RAPAT DICABUT)**

Baiklah.

Sebelum membuka RDPU pada pagi hari ini, perlu kami sampaikan bahwa daftar hadir telah ditandatangani oleh 9 Anggota Komisi IX dari 5 Fraksi dan karena di dalam Tata Tertib RDPU tidak, berarti tidak harus 2 Pimpinan maupun harus kuorum karena sifatnya adalah mendengarkan masukan dari umum, maka kami nyatakan sidang kita teruskan dan mengenai waktu pukul rapat, kita start dari pukul 10.30 WIB hingga pukul 12.00 WIB.

Apakah bisa disetujui?

**(RAPAT : SETUJU)**

Baiklah.

**Bapak-bapak/Ibu-ibu,**

Saya pertama-tama mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Teman-teman dari KSPI yang sudah hadir dan juga Migrant Care. Inti daripada undangan kita pada pagi hari ini adalah kami ingin mendengarkan beberapa masukan-masukan dari KSPI sesuai dengan jadwal audiensi yang diberikan dan kami adalah dari Anggota Komisi IX yang umumnya adalah rata-rata baru bertugas di Komisi IX. Disini ada kawan-kawan kami

yang sudah hadir ada Pak Utomo, beliau adalah Mantan Anggota, Pak Utomo benar ya, oh ganti, Pak Chaidir, ini mantan Anggota DPRD dan lalu dari Fraksi Gerindra, lalu kemudian ada Pak Ayub Mantan Anggota DPRD juga dari Jember, Pak dr. Suwir, ini mantan bupati dari, maaf mantan walikota dari Sumbar, Sumatera Barat, lalu kemudian ada Pak Zulfikar ini Mantan Bupati dari Jambi, Bungo, lalu ada Ibu Donna, Ibu Donna ini dulu incumbent bukan Bu? Belum ya. Ya Ibu Donna ini dari Bengkulu, Politisi juga dan Ibu Irma, Ibu Irma dari Nasdem, Beliau mungkin teman-teman dari KSPI, jadi sudah paham sekali permasalahan perburuhan. Kemudian ada Pak Ali Taher dari Fraksi PAN. Beliau adalah Mantan Direktur Rumah Sakit, dan saya sendiri Dede Yusuf dari Fraksi Demokrat. Saya mantan artis sajarah Pak.

Terima kasih sekali lagi.

Kita mendengar beberapa isu yang cukup besar terkait masalah perburuhan tentunya dan juga masalah migrant care, masalah pekerja-pekerja kita yang harus perlu mendapatkan perlindungan. Untuk itu, kami mengharapkan Bapak-bapak/Ibu-ibu bisa memberikan kami suatu pencerahan, sebuah wawasan baru terkait masalah perburuhan dan kami berikan waktu seluas-luasnya nantinya kepada Bapak-bapak dan Ibu-ibu untuk mempersentasikan dan langsung juga kalau ada isu-isu terkait naiknya BBM sekarang ini silakan saja Bapak sampaikan dan ini akan menjadi catatan bagi kami.

Oh ini ada 1 lagi Pak Hamid dari Fraksi PKS, Anggota DPRD-nya dulu, Anggota DPRD juga.

Sementara baru ini, mungkin dalam waktu ke depan akan lebih banyak lagi yang datang.

Kami persilakan Saudara Sekjen untuk sebelumnya memperkenalkan dahulu kepada teman-teman lain sambil menunggu mungkin Pak Iqbal akan hadir disini untuk memulai paparan dari, KSPI dulu atau Migrant Care dulu, terserah Bapak, KSPI dulu, KSPI dulu ya.

Kami persilakan Pak.

Silakan.

#### **SEKJEN KSPI (MUHAMAD RUSDI):**

Terima kasih Pak Dede Yusuf selaku Ketua Komisi IX DPR RI yang kami hormati.

Inilah pertemuan kita yang kedua dengan Pak Dede Yusuf. Sekitar 2 minggu lalu kita sudah bertemu juga dengan Pak Dede beserta Wakil Ketua DPR. Sebelumnya, kami ucapkan selamat bertugas kepada seluruh Anggota DPR RI Komisi IX yang baru terpilih semoga kita bisa bersinergi dalam rangka untuk mensejahterakan buruh dan juga rakyat Indonesia.

#### **Bapak-bapak sekalian yang kami hormati dan juga Ibu-ibu sekalian,**

Nama saya, Muhammad Rusdi, Sekjen dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dimana Bung Sahid Iqbal sedang on the way, Beliau adalah Presiden dari KSPI. Bersama saya hadir Pak Sofyan Abdul Hakim, Beliau adalah Ketua Umum dari Federasi Siap Bekerja Pariwisata Reformasi dan juga salah satu Wakil Presiden KSPI bidang Pengupahan adalah Zuki Azhari Ketua Umum dari Federasi Serikat Pekerja Farmasi Kesehatan Reformasi dan juga Anggota dari Majelis Nasional KSPI, kemudian Pak Agus Toniman Ketua Umum dari Federasi Percetakan Media Penerbitan, KSPI juga, dan juga wakil ketua majelis nasional, mantan Anggota DPR juga dia ini, kemudian ada Mbak Lita mitra kita dimana KSPI bersama dengan beberapa elemen serikat pekerja tergabung dalam yang namanya Komite Aksi Pekerja Rumah Tangga dalam rangka pengawalan terhadap RUU PRT (Pekerja Rumah Tangga) bukan Pembantu. Jadi kita ada istilah PRT itu Pekerja Rumah Tangga. Kemudian yang paling ujung adalah Bung Yudi Winarno

Bendahara FSPMI Pekerja Metal dan juga penanggung jawab untuk isu outsourcing kita di KSPI dan juga aktif di GEBER BUMN (Gerakan Bersama BUMN) yang sedang mendorong kasus-kasus di outsourcing di BUMN. Kemudian di belakang Ribut Santosa dari Federasi Serikat Pekerja Industri Semen, dari Indo Semen kebetulan. Kemudian Pak Pak Effendi Idris dari Federasi Pariwisata, kemudian Ibu Pegi juga Federasi Pariwisata dan Ibu Ani Simanjutak dari Federasi Kimia Energi Pertambangan dan yang baru datang juga ini Teman-teman dari Federasi Pariwisata.

Jadi KSPI itu ada 9 Federasi termasuk nanti SPN (Serikat Pekerja Nasional) dengan total anggota, termasuk dengan PGRI yang tercatat kita punya Anggota 1,8 juta, yang terbesar masih PGRI sekitar 900 ribu, kemudian SPN 798 ribu, Federasi Metal itu 225 ribu, kemudian Kimia Energi Pertambangan 150 kemudian saya dari Aspec Indonesia sekitar 80 ribuan dan yang lain-lain.

### **Bapak/Ibu sekalian,**

Senang sekali kita di awal kerja dari Komisi IX ini bisa sharing, bukan pencerahan Pak karena saya yakin yang ada di depan kami ini adalah semua adalah mantan-mantan pejabat di daerah yang tentunya sudah sangat paham. Nah kami datang kesini ingin sharing dan juga ingin menyamakan persepsi tentang bagaimana konsepsi sejahtera, karena buruh Indonesia perjuangannya adalah tujuannya kesejahteraan buruh dan juga rakyat. Nah ini yang juga kita ingin sharing.

Nah mungkin lanjut.

Nah kita bicara sejahtera, bicara buruh di Indonesia kita punya trauma persepsi tentang bagaimana buruh Indonesia di masa lampau, di masa VOC, Belanda, kemudian Jepang, kita pernah yang mengalami sistem kerja tanam paksa, kerja paksa dan Romusha yang pada prinsipnya sesungguhnya tidak jauh berbeda dengan apa yang sedang dialami hari ini status kerja yang tidak jelas, kemudian juga eksploitasi tenaga yang luar biasa dan upah yang tidak jelas, sesungguhnya sama. Nah ini kami ingin memulai, mungkin bisa sampaikan, kita ingin memulai, ini ada kaitan dengan investasi atau yang bercodok kolonialisasi. VOC sesungguhnya adalah perusahaan, dia datang Tahun 1602, kemudian 1799 bangkrut, kemudian Kerajaan Belanda mengambil alih dan lain-lain, kemudian Jepang masuk dan lain-lain.

Nah kami ingin memastikan ini bahwasanya apa yang sedang kami perjuangkan dan tantangan yang kami hadapi pada hari ini sesungguhnya tidak jauh berbeda dengan apa yang dialami oleh leluhur kita, oleh founding father kita, dari Abad XVI, XVII, XVIII, XIX, kemudian terbentuknya Serikat Islam, terbentuknya Serikat Pekerja Penggadaian, Serikat Pekerja Kereta Api dan lain-lain, muncul HOS Tjokrominoto, muncul Soekarno, muncul Agus Salim, kemudian muncul Muhammad Hatta dan lain-lain, muncullah kemudian Republik Indonesia. Ini suatu bagian yang tidak terpisahkan. Ini awal saya ingin coba buka ini, bahwasanya memang sesungguhnya investasi yang hadir ke Indonesia itulah berkedok kolonialisasi. Kita punya teman-teman yang bekerja di Indo Semen, kita paham di Indo Semen pabriknya luar biasa luas, 6 kecamatan dari ujung Jagorawi sampai ujung Hambalang dan lain-lain, Freeport dan itu juga bagian dari aktivis yang sedang memerjuangkan tentang kesejahteraan, sehingga tema kesejahteraan kita dalam konteks buruh bukan hanya bicara kita minta upah kepada Pengusaha saja, tetapi berbicara sejahtera adalah bagaimana buruh bisa hidup sejahtera.

Lanjut mungkin Bung Hakim.

Ya, kita punya ... yang luar biasa. Ini sebagai pengantass saja.

Lanjut.

Ini adalah peta-peta yang sudah tersebar di dunia maya, berasal dari BP Migas tentang semua daerah dari Aceh sampai Papua sudah dipeta-petakan, ada yang bermain di

perkebunan, ya teh, kopi, sabun dan lain-lain, minyak sawit, ada yang menguasai pertambangan, ada yang menguasai perdagangan dan lain-lain.

Lanjut.

Nah sehingga menjadi sebuah pertanyaan kritis kami kenapa Indonesia negara kaya tetapi buruh dan rakyatnya miskin. Pertanyaannya apakah kami miskin? Karena kami miskin, karena kami malas tidak, apakah kami bodoh juga tidak, apa kami tidak bekerja tidak, kami bekerja tetapi masih miskin, apakah negara kita miskin tidak juga tetapi miskin kami adalah karena dimiskinkan, diciptakan, direkayasa, inilah yang menjadi pandangan kami, ini yang dari awal kami bukan ingin pencerahan tetapi ingin suatu persepsi. Inilah pandangan kami, karena kita berjuang sudah ribuan kali, sudah aksi tetapi juga terbentur dengan sebuah tembok besar dengan sebuah sistem politik dan ekonomi sistem bisnis yang memang membuat kami menjadi tidak sejahtera.

Lanjut Pak.

Nah kami sendiri dalam konteks menuju kesejahteraan, ada 4 tema sentral. Pertama, perjuangan upah layak. Yang pertama adalah upah layak ini terkait dengan upah minimum yang hari ini sedang kami perjuangkan, hari ini sedang aksi kami di Banten kemudian juga di Kabupaten Bekasi, kemudian kemarin juga aksi di Bintan dan di Batam, 13 Anggota Kami di Bintan dipukuli oleh Polisi, babak belur, 3 masuk rumah sakit, beberapa juga masih dirawat di Bintan di Kepulauan Riau dan juga besok Teman-teman Jakarta katanya Bu Irma menutup pelabuhan di tempat Ibu Irma bekerja Hari Kamis. Sekarang, sedang terjadi sebuah pergolakan upah minimum belum selesai.

Yang kedua adalah perjuangan jaminan sosial. Jadi ingin sampaikan kepada teman-teman Anggota Dewan, bahwasanya sejahtera itu bukan hanya upah, tetapi upah kemudian jaminan sosial. Di Indonesia Jaminan Sosial dalam Undang-Undang SJSN baru ada 5 program. Sebelumnya Undang-Undang Jamsostek 4 program. Insya Allah Tahun depan Juli, 1 Juli 2015 itu tambah 1 program jaminan pensiun. Jadi per 1 Juli 2015 Insya Allah kalau berjalan lancar, skemanya juga jelas, itu pegawai swasta akan mendapatkan program jaminan pensiun, bukan hanya PNS per 1 Juli 2015. Sampai hari ini RPT-nya belum selesai, belum disepakati. Nah di luar 5 itu, standard ILO itu ada 9 program. Jadi saat ini Indonesia sudah ada jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kesehatan, jaminan hari tua dan jaminan pensiun, ini yang berlaku di Indonesia. Sebelumnya Undang-Undang Jamsostek cuman 4, kemudian SJSN mengintegrasikan jaminan sosial Indonesia termasuk jaminan kesehatan yang tadinya ada di Askes, Taspen, Asabri, sekarang menjadi SJSN, turunannya adalah Undang-Undang BPJS, BPJS Kesehatan, kemudian BPJS Ketenagakerjaan. Di BPJS Ketenagakerjaan ini ada 4 program yang nanti akan berlaku 1 Juli 2015. Nah ada 4 program lagi standard ILO yang belum berlaku di Indonesia, kita harap ini bisa segera nanti bisa jalan, mungkin bisa langsung Bung Hakim, terus.

Nah ini standard ILO 9 program. Yang belum adalah jaminan kehamilan, kemudian jaminan kecacatan, yang ketiga jaminan membesarkan anak. Jadi kalau di luar negeri itu tidak perlu lagi ada istilah mau ngapain lembur buat susu anak, tidak perlu lagi karena buat susu anak sudah ditanggung oleh negara, ada rekening khusus buat Ibu-ibu dan terakhir adalah jaminan pengangguran. Di Vietnam dan di Eropa, orang nganggur itu dicariin kerja, kalau tidak dapat kerja juga dari 6 bulan sampai setahun negara yang memberikan subsidi jaminan pengangguran sekitar 60-70% gaji terakhir. Di luar negeri ada atau tidak outsourcing? Ada outsourcing, tetapi ketika mereka menganggur negara yang kemudian bertanggung jawab. Nah di Indonesia mau tidak, mau kerja mau nganggur, mau sakit, mau tidak dirawat, mau ditolak rumah sakit itu dibiarkan saja.

Nah inilah kira-kira parameter kedua apa yang mau kita kejar terkait dengan kesejahteraan, mungkin balik lagi ke step awal. Nah plus ada 3 program yang ingin coba kita kejar yaitu pendidikan gratis, kemudian juga kesehatan sudah termasuk juga

transportasi publik murah, juga negara fasilitas publik yang non ac itu bisa gratis. Jadi ini yang mau kita coba samakan persepsi bagaimana sejahtera, upah atau pendapatan yang layak, kemudian jaminan sosial. Nah bicara jaminan sosial, ini bukan hanya untuk buruh tetapi untuk rakyat semuanya, bagaimana APBN dan lain-lain, tinggal bagaimana skemanya. Kalau di Negara Eropa itu ada yang mengambil dari pajak, ada yang mengambil dari sebagian dari iuran. Di Indonesia, sistem BPJS itu adalah Asuransi Sosial. Kita menyempurnakan konsepsi lama jamsostek dan yang lainnya. Kalau Jamsostek dulu BUMN, dulu Jamsostek bukannya disumbang oleh negara tetapi bayar deviden kepada negara tetapi hari ini melalui Undang-Undang BPJS Kesehatan, negara yang melakukan, memback-up kalau nanti kurangnya dananya, negara yang memback-up.

Yang ketiga, kita sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar 1945 bahwasanya perekonomian disusun sebagai atas usaha bersama, kekeluargaan. Nah hari ini Indonesia kaya tetapi yang menikmati adalah perusahaan-perusahaan besar. Investasi datang tetapi yang menikmati adalah perusahaan-perusahaan besar. Ada sebuah terjadi ketimpangan kesejahteraan. Kalau kita mengenal ada istilah demokrasi politik, belum terjadi demokrasi ekonomi, belum terjadi sharing kesejahteraan, sharing ekonomi belum ada, makanya ... kita makin tinggi 0,43. Nah kita berharap besar ke depan sesuai amanah, konsepsi dari Muhammad Hatta, koperasi-lah yang harus dibangun. Di banyak negara, koperasilah dan bahkan ada Rabo Bank dari Belanda itu pemiliknya Koperasi, beberapa perusahaan-perusahaan besar di Belanda, Inggris, Eropa pemiliknya koperasi. Nah ini kita berharap besar koperasi ke depan menjadi sebuah acuan. Bahkan di Anggota kami di Indo Semen misalkan itu mereka sudah punya SPBU 2, di Kayaba di Bekasi mereka sudah punya pabrik. Jadi besar dan asetnya rata-rata banyak yang sudah di atas milyaran. Nah ini yang sekali lagi kita ingin bagaimana marwah ekonomi kita nanti bukan ke atas tetapi bawah, grassroad-lah yang akan memiliki. Bahkan dapen-dapen pensiun, dana pensiun kami itu rata-rata itu mereka seperti SPBU mereka saldonya itu atau asetnya sudah mencapai 6,8 Trilyun. Jadi jangan diremehkan. Eropa itu negara, Eropa Barat mereka sejahtera, Finlandia, Denmark, Swedia bisa sejahtera tingkat kesejahteraan pendidikan sangat tinggi bukan karena kaya tetapi mereka memmanage uang rakyatnya dengan baik, uang buruhnya dengan baik. Nah inilah yang belum dioptimalkan oleh negara ini. Kalau misalkan BKPM perelease akhir tahun lalu mengatakan investasi masuk ke Indonesia, totalnya adalah 393 Trilyun. Itu sudah luar biasa. Nah kami hitung dengan potensi 44 juta pekerja formal, seandainya taflet, ada gerakan nabung, muda-muda kan investasi melalui koperasi dan bank buruh misalkan, di India juga dan di Jepang mereka serikatnya juga punya bank juga begitu, 1 juta x 12 bulan x 40 juta saja misalkan, itu terkumpulkan 480 Trilyun, lebih besar dari investasi yang masuk, dari target BKPM 2014. Ini sangat dasyat. Nah inilah yang kita ingin sama-sama, punya persepsi yang sama bagaimana desain bisnis, desain ekonomi, desain pembangunan, yang bertumpu kepada rakyat, kami sanggup, tetapi bagaimana mekanisme, bagaimana keberpihakan dan bagaimana grand design.

Yang keempat adalah ini suka/tidak suka bahwasanya kita miskin karena APBN kita dikorup yang juga adalah bahwasanya hari ini kalau kata Refision Bahir, tema sentral kesejahteraan, bicara tema kesejahteraan, bicara solusi kesejahteraan, kalau tidak memulai, tidak mendasarkan bahwasanya hari ini kita pergi saja, maka itu omong kosong, maka suka/tidak suka hari ini kita dari gerakan buruh merasa kita masih terjajah secara ekonomi.

Itu perspektif dari kami dari Gerakan Buruh, karena kami sudah aksi kemana pun tetap saja tembok besar dan lain-lain.

Mungkin lanjut Pak Hakim.

Ya lanjut terus.

Nah ini hak konstitusi yang ada di Undang-Undang Dasar 1945, dari mulai hak mendapat pekerjaan layak, penghidupan yang layak, hak mendapat jaminan sosial, hak mendapat jaminan kesehatan, termasuk hak untuk pendidikan dan hak untuk mendapat perumahan. Sekarang ini di Jakarta kalau upahnya tidak 10 juta, sudah tidak mungkin bisa beli tanah atau beli rumah di Jakarta, apalagi dengan UMP cuman 2,4, cuman naik 2,7 juta, tidak mungkin bisa punya rumah di Jakarta tidak mungkin termasuk juga di Bekasi, semua tanah-tanah Bekasi Karawang itu sudah punya Agung Sedayu, sudah punya Lippo, Podomoro, Sinar Mas dan lain-lain, sudah tidak mungkin Pak, di Jabodetabek sudah tidak mungkin, kita sudah paling sudah Karawang dan lain-lain. Ini yang harus diperhatikan, jadi tidak mungkin. Mau 5 juta pun UMP tidak mungkin kita bisa menyicil, karena cicilan itu sudah hampir 1 juta ke atas, UMP kita cuman 2,4 sudah buat makan sudah habis. Nah ini yang sekali lagi yang PR yang makin berat, yang Jakarta akhirnya rumah, rumah orang tua dipetak-petak yang ada, makin sempit tetapi tidak mungkin ada terjadi sebuah pertumbuhan perumahan-perumahan baru, perumahan sederhana di Jakarta, Jabodetabek sudah tidak mungkin, makanya kami juga ingin mengingatkan bagaimana tanggung jawab negara sesuai dengan Undang-Undang 1945 bahwasanya hak pendidikan, hak kesehatan juga sama dengan hak perumahan. Nah itu, dan itu yang terakhir adalah bagaimana amanah Undang-Undang 1945 tentang ekonomi yang harus dibangun tentang koperasi dan lain-lain.

Lanjut.

Nah ini sebagai pembuka awal tentang bagaimana problem kesejahteraan yang kami hadapi bahwasanya sesungguhnya kami tidak melihat negara hadir dalam proyeksi kesejahteraan di Indonesia terutama dengan Buruh. Nah secara teknis, secara spesifik kalau bicara buruh tadi ada upah, kemudian jaminan sosial, kemudian juga ada bicara tentang hubungan kerja dalam hal ini adalah outsourcing termasuk juga nanti adalah teman-teman PRT dan juga buruh migrant. Nanti buruh migrant, mungkin teman-teman dari Migrant Care, kami disini akan coba sharing tentang upah, kemudian juga outsourcing dan juga jaminan sosial, pasti nanti teman-teman dari PRT.

Terkait dengan upah, hari ini upah Indonesia di Jakarta itu Jabodetabek 2014 2,4 juta. Itu standard jabodetabek tertinggi, jabodetabek dan batam. Kalau di Jawa Tengah itu kami menyebut upah terendah sedunia terutama di Banjar Negara, Upah Indonesia itu masih Rp910.000,00. Itu terendah Jawa Tengah. Ada lagi Cilacap Barat, kemudian juga di kampungnya Pak SBY di Pacitan, kalau di Jabar itu terendah di Majalengka dan lain-lain itu tidak jauh antara 900 ribu-1 juta. Pertanyaannya, mana mungkin dengan upah 900 ribu itu buruh bisa sejahtera, tidak mungkinlah, kami menyebutnya kami bekerja tetapi kami masih miskin. Nah di Jakarta, problemnya adalah untuk tahun ini saja itu UMP yang dibutuhkan Jakarta Ahok kemarin cuman naiki 250 ribu saja atau sebesar 10%. Di Kota Bekasi naik hampir 500 ribu. Di Jawa Timur, Mojokerto, Sidoarjo, Pasuruan dan Gresik sama naiknya 500 ribu. Nah problemnya adalah kenapa bisa beda? Nah Jakarta termasuk adalah kita secara ekonomi lebih tinggi dari Bangkok, dari Philipina. Di Philipina, UMP-nya sudah 3,6 juta, di Bangkok sudah hampir 3,2 juta. Kita tidak bicara Taiwan, Hongkong, TKI disana sudah hampir digaji 9 juta di Taiwan, di Hongkong bisa belasan, di Korea bisa belasan, di Jepang mereka 25 juta termasuk di Australia kalau di kurs rupiah itu UMP di Australia itu sudah hampir 40 juta, kenapa orang Australia banyak di Bali karena walaupun Supir mereka juga kan, karena 40 juta mereka saving per bulan 10 juta, per tahun mereka bisa saving 120 juta, di Bali jadi raja minyak disana, tetapi orang Jakarta sendiri tidak mungkin ke Bali. Nah ini problemnya adalah ada sebuah sistem pengupahan yang bermasalah. Nah ini beberapa regulasi yang membuat upah kita menjadi rendah, ada tentang Permenakertrans tentang KHL No. 13/2012 jumlah itemnya masih 60 item, sedangkan penelitian dari suatu lembaga riset itu kalau untuk keluarga, jadi UMP itu diputuskan berdasarkan survei KHL. KHL itu adalah Kebutuhan Hidup Layak Pekerja Lajang. Jadi yang



disurvei adalah kebutuhan hidup layak pekerja lajang, jumlahnya 60 item. Hitungan kami kalau untuk keluarga 122, kalau untuk lajangnya harusnya 84 item, masih kurang 24. Nanti akan kami jabarkan apa saja item-item yang kurang. Nah kemudian juga tahun lalu Pemerintah tiba-tiba mengeluarkan paket kebijakan tentang pengupahan yang prinsipnya membatasi upah murah atas lobby dari Sofyan Wanabi, Gembom Pengusaha Hitam di Indonesia yang membatasi upah tidak boleh naik tinggi dan lain-lain termasuk juga ada kebijakan tentang industri padat karya dan lain-lain.

Lanjut.

Nah ini sekilas kebutuhan buruh pada 2015 ini, yaitu naik 500 ribu hingga 600 ribu. Kenapa besar? Karena memang selama ini sistem pengupahan kita ini bermasalah. Banyak mafia-mafia upah yang bermain di hampir seluruh daerah, yang membuat upah menjadi turun terus. Nah kita berpikir dalam 3 tahun ke depan 2015, 2016, ini naiknya mungkin sekitar 500 ribu terus sampai nanti sama, Jakarta sama dengan Bangkok, Jakarta sama dengan Manila baru kita naiknya akan flat-lah sesuai dengan inflasi, tetapi hari ini kita ngejar dulu, karena sekali lagi kita tidak minta sama dengan Jepang, tidak bisa minta sama dengan Hongkong, dengan Australia tidak, yang kita mau Bangkok dan Manila yang secara ekonomi kita lebih tinggi dari mereka.

Ya lanjut.

Nah ini 24 item yang kurang. Ya air minum itu kemarin di DKI Jakarta, kebutuhan air minum itu hanya dihitung 9 ribu perak, 9 ribu perak per bulan. Itu hanya cukup buat 3 botol aqua saja. Di Jakarta Utara, itu dia untuk mandi saja, dia harus beli 1, per hari itu 1 dirigen, dan yang minimal, itu 4 ribu per hari, buat minum standard kesehatan itu harusnya kan per liter per hari 2 liter, per bulan itu 60 liter, 60 liter itu sama dengan 4 galon. 4 galon kalau beli aqua 60 ribu, tetapi disitu hanya 9 ribu perak, kemarin ditambahkan cuman tambah sekitar 30 ribu saja. Nah kemudian di item yang tidak ada itu, di item 60 juga tidak ada t-shirt Pak, t-shirt lengan pendek, yang ada kaos dalam, tetapi t-shirt tidak dihitung, kemudian baju tidurlah. Jadi yang ada cuman baju formal seperti ini dan kaos dalam, jadi buat tidur juga pakai baju ini juga begitu kan? Kemudian, jaket. Jaket tidak ada, bukan jaket yang mahal ya, jaket yang buat naik motorlah, standard naik motor saja, itu juga tidak ada, sandal formal tidak ada, adanya sandal jepit, sandal seperti merk bata itu dan lain-lain itu tidak ada, kemudian tas kerja, ya wajarlah kalau pekerja itu minta tas, bawa tas ransel buat laki-laki atau tas buat wanita, dompet juga tidak ada, jadi gaji nerimanya nerima lembaran saja begitu, amplop saja termasuk jam dinding dan jam tangan tidak ada, payung dan jas hujan tidak ada, tetapi kami minta jas hujan karena Indonesia adalah negara tropis, kemudian juga sebagian besar pekerja naik motor dan lain-lain. Kemudian gorden, ada rumah tetapi tidak ada gorden. Kemudian karpet tidak ada, mesin cucinya tidak ada. Kenapa kami minta mesin cuci, karena pola di buruh itu lembur terus, pagi dari jam 8 sampai jam 8 malam, hampir senin sampai sabtu bahkan minggu. Jadi mesin cuci itu bukan hal yang mewah-lah, tergantung merk nanti. Kemudian dispenser. Dispenser juga saya pikir bukan barang mahal tetapi memang menjadi sebuah kebutuhan. Sekali lagi, tetapi mainnya di merk, kami tidak minta merk yang high quality, merk yang buat buruh yang penting asal ada. Hitungannya nanti itu dibagi ada yang per tahun, ada yang per 6 bulan, ada yang per 2 tahun, ada yang per 3 tahun, biasanya kalau kulkas itu, kita juga minta kulkas, itu hitungan 4 tahun tetapi harga misalnya 1.200.000 kulkas-lah itu dibaginya per 4 tahun berarti 4 x 12 bulan dibagi 48, jatuhnya paling cuman 30 ribu untuk hitungan kulkas, 4 30 ribuanlah untuk kulkas, untuk dispenser paling jatuhnya cuman 15 ribu, 20 ribu, sangat kecil per bulan. Kemudian termos, kemudian juga pembersih lantai, televisi, televisi tidak masuk hitungan, televisi berapa sih harganya sekarang, paling mahal 2 juta, buat buruh paling cukup 1,5 juta, dibagi 4 tahun jatuhnya cuman 30 ribu per bulan, kemudian juga vitamin. Minyak wangi, bukan parfum tetapi minyak wangi, minyak wangi yang standard kami itu

standard condet Pak, standard isi ulang, per bulan cukup 20 ribu, tetapi kami dibulli buruh minta parfum, waduh, kami dibuli, buruh minta kosmetik, ya wajarlah kosmetik itu ya bedak, masa tidak pakai bedak. Yang dianggap buruh Pak, Anggota KSPI ini adalah teman-teman yang di pabrik manufaktur termasuk teman-teman yang di Giant, yang di Hero, Ramayana, yang di Jalan Tol termasuk yang di Indosat, Pak Zumhur ini Anggotanya di rumah sakit perawat, penerbitan, pak sopir angkutan di hotel, jadi wajar dong kalau kita minta minyak wangi, kita minta bedak, karena perusahaan tidak siapin bedak dan minyak wangi.

Nah ini kira-kira 24 item yang masih bermasalah. Nah di luar 24 item ini kenapa, jadi menjadi pertanyaan kritis kenapa UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota) itu dari Aceh kemudian di Pulau Jawa, di Pulau Kalimantan, Sulawesi, dan Papua itu beda, padahal item yang disurvei sama. Nah perbedaannya adalah ada spesifikasi teknis yang kurang jelas, yang diatur dalam Permenaker 13, sehingga misalkan hitungan transportasi di DKI itu hanya menghitung sebelumnya 345 ribu per bulan, kan dinaikan jadi 360 ribu atau 12 ribu per hari. Hitungannya adalah naik angkot atau naik busway 2 kali 3 ribu-3 ribu dikali 2, tetapi di Mojokerto bisa 498 ribu, karena menghitungnya mereka naik angkot itu adalah yang pertama adalah 3.500 yang kedua bisa jadi 3.500, jadi 7.000 kali 2 14 ribu, 14 ribu kali 30 hari bisa lebih. Nah Jakarta sebenarnya kemarin kita sudah samperin ke Ahok, misalkan di Jakarta itu minimal itu orang naik commuter line itu 3.500, naik busway 3.500, kemudian bisa jadi naik angkot dan bisa jadi naik lagi naik kalau ke kawasan industri harus naik ojek lagi. Nah itu yang unsur ojeknya tidak dihitung sama angkotnya, di DKI hanya dihitung naik commuter line 3 ribu, naik busway 3 ribu. Nah di Jawa Tengah kenapa bisa kurang? Ternyata di Jawa Tengah itu hanya dihitung sekali saja naik angkot dari rumah ke pabrik, padahal realitasnya hampir semua buruh ke pabrik itu naik 2 kali naik angkot tetapi di Jawa Tengah yang dihitung hanya sekali saja. PP membuat beberapa daerah seperti di Jawa Tengah kemudian juga di Majalengka, di Cirebon Kuningan itu jatuh upah minimum karena cara menghitung dari KHL itu masih bermasalah, tabirnya masih beda, dan lain-lain, termasuk juga daging, kebutuhan daging di Jakarta ini, kemarin yang disetujui oleh Ahok hanya sebesar 47 ribu perak per bulan daging Pak, itu dapat apa itu? sekilonya itu sekitar 90 ribu, kebutuhannya 0,75 kilo. Nah kemudian kenapa rendah? Karena daging sapi dan daging ayam digabung, dibagi 2, daging sapi harganya 100 ribu, daging ayam per kilo 30 ribu, kemudian dibagi 2, jadi 65 ribuan, kemudian yang dibutuhkan hanya 0,75 kilo. Maka buruh cuman makan daging DKI seharga 47 ribu perak per bulan. Ini tidak rasional. Kemudian kemarin juga minta Teman-teman kebutuhan karbohidrat, kemudian kebutuhan sayur mayur juga bermasalah, kebutuhan karbohidrat. Ini yang kami minta bahwasanya Pemerintah harus mendorong, DPR harus mendorong Pemerintah untuk mereformasi, merevisi sistem hitungan KHL. Kualitasnya bermasalah dan kuantitasnya bermasalah, ini yang menyebabkan kenapa Indonesia upahnya jauh tertinggal dari Manila, karena tadi, cara menghitung KHL bermasalah.

Nah lanjut.

Termasuk teh dan kopi. Saya mau sampaikan di Jakarta Kebutuhan Teh dan Kopi itu hanya dihitung 12 ribu perak per bulan, mana cukup segitu kopi dan teh cuman 12 ribu perak dan terakhir di Jakarta yang kami kemarin debat juga, kebutuhan rekreasi hanya dihitung 1.900 per bulan. Jadi dihitungnya adalah standard hitungannya adalah rekreasi per 6 bulan sekali. Yang dihitung hanya tiket masuk ragunan 15 ribu perak dibagi 6 bulan kurang lebih 2 ribu perak, kalah dengan kemarin di Karawang hampir 40 ribu, di Cilegon hampir 50 ribu per bulan. Nah makanya Buruh minta hitungannya adalah bioskop. Kenapa bioskop? Ya standard-lah, buruh ini kan rata-rata D3 Pak, di manufaktur itu D3. Ketika mereka masih kuliah itu nonton bioskop biasa, tetapi kata Ahok buruh kok minta bioskop, bioskop itu rata-rata, itu pun 6 bulan sekali, bukan 1 bulan sekali hitungannya. Jadi nonton bioskop yang

kami minta plus makan dan transportnya kira-kira 180 ribu per bulan dibagi 6 bulan, jatuhnya tidak lebih dari 25 ribu, itu pun ditolak.

Jadi angka UMP DKI 2,7 juta itu, angka rekasinya masih 1.900 perak. Ini Jakarta Pak, Kota Metropolitan, Ibukota Negara, angka rekasi maju 1.900 perak. Nah inilah yang ironis kami sampaikan tetapi katanya Buruh egois, dan yang egois dan arogan siapa? Ahok-lah yang arogan, maka Buruh mungkin akan gabung dengan FPI ini Pak mau jatuhi Ahok, karena tadi arogan sekali, rekreasi hanya 1.900, teh dan kopi hanya 12 ribu per bulan, kemudian pendidikan itu hitung, pendidikan itu dihitung, langganan tabloid 4 kali dalam sebulan, kemudian radio, radio itu masih yang sangat kuno, langganan tabloid itu sekitar 4 ribu X 6 ribu, 4 kali 6 ribu 24 ribu, radio itu kalau dihitung-hitung per bulan 4 ribu,  $24 + 4 = 28$ , bukan dipakai jadi acuan tetapi 28 ribu : 2 = 14 ribu. Jadi kebutuhan pendidikan buat pekerja lajang, dihitung hanya 14 ribu perak di DKI. Itu item yang kami tolak juga, sampai kami rasional Pak Ahok, yang rasional, teh dan kopinya rasional, daging tidak rasional, kemudian pendidikan tidak rasional, air tidak rasional, rekreasi tidak rasional tetapi masih diputuskan juga. Nah inilah, itu Jakarta, kenapa Jakarta akhirnya upahnya lebih rendah tetapi kalau jadi diputuskan oleh Bekasi Kota itu 2,9, 2.940.000 tetapi di DKI hanya 2,7 saja.

Nah itu kira-kira terkait dengan upah.

Lanjut mungkin Pak Hakim.

Ke depan, kami berharap ada sebuah hitungan yang berbeda Pak. Kalau hari ini kan yang dihitung-hitung bahan mentahnya, padahal pekerja lajang itu tidak mungkin mengolah 1.000 mengolah sayur-mayur, mengolah daging tidak mungkin apalagi tadi belum ada kulkas, disuruh beli daging sebulan tetapi tidak disiapkan kulkas ya basi begitu kan, disuruh sayur mayur hitungannya sekian kilo tetapi tidak ada kulkas ya basi. Nah kami menghitung seperti juga di beberapa negara, menghitungnya bukan lagi di berapa daging, berapa buah-buahan dan lain-lain tetapi menghitungnya makan siang, makan pagi berapa, kami ambil sederhanalah makan pagi itu nasi udak pakai telur, makan siangnya itu nasi soto ayam, malam itu pecel lele atau nasi goreng pakai telur, harganya 10 ribu, kemudian teh itu 3 ribu perak segala macan. Itu jatuhnya di Jakarta 3,81 Pak. Itu cara menghitung di beberapa negara seperti ini katanya. Jadi sederhana. Jadi menghitung riil kebutuhan berapa biaya makan, berapa biaya kebutuhan beli baju dan lain-lain, idealnya di Jakarta adalah di Jabodetabek-lah dia 3,8. Jadi cara menghitung KHL itulah yang bermasalah saat ini termasuk juga kuantitas yang berkurang dan kualitasnya bermasalah. Nah kalau ini hari tidak selesai, maka tiap tahun itu mulai dari Oktober, November, Desember sampai Januari pasti di Indonesia pasti ada Demo Buruh terus, karena itulah penetapan Upah Minimum dan Upah Minimum Kota. Pak Dede mungkin pernah mengalami bagaimana teman-teman di Jawa Barat, di Bekasi, Karawang, Bandung Raya lain-lain pasti Oktober November itu pasti demonya kalau tidak ke kantor bupati dan kantor gubernur, pasti setiap tahun. Nah ini yang kita minta revisi. Nah Pemerintah memang sedang menggodok yang namanya RPP (Rancangan Peraturan Pemerintah) sesuai dengan amanah Undang-Undang 13 Pasal 88, 89, 90. Ini amanah dari Undang-Undang 13 Ketenagakerjaan. Jadi Undang-Undang itu mengamanahkan tentang bagaimana cara menghitung pengupahan. Problemanya adalah aturan KHL tadi, itu tidak ada cantolannya. Jadi Kepmen atau Permen tentang KHL itu tidak ada cantolannya. Harunya cantolannya itu RPP, PP mengenai Pengupahan. Itu amanah dari Undang-Undang No. 13 Tahun 2003. Jadi sudah 11 tahun Pemerintah abai, belum membuat yang namanya RPP Pengupahan. Nah sejak tahun lalu Pemerintah sudah merancang RPP Pengupahan, hanya saja problemanya adalah dalam Draft Pemerintah itu kenaikan UMP itu 2 tahun sekali. Ini yang bikin buruh makin, ini kok Pemerintah kok bukannya ingin mensejahterakan rakyat, tetapi kok ingin sudah naiknya kecil tetapi dihitung 2 tahun sekali. Ini yang makin parah. Itu tetapi sudah kita sampaikan juga di lampiran yang

kami sampaikan tentang RPP Pengupahan. Nah kita ingin sekali lagi, DPR RI Komisi IX ini juga, karena itu adalah tanggung jawab dari DPR yaitu bagaimana Undang-Undang 13 di Pasal 97 itu mengamanahkan dibuatnya PP tentang Pengupahan. Hanya saja PP Pengupahan yang diatur oleh Pemerintah itu bukan pro terhadap buruh, justru membuat buruh makin tidak sejahtera karena upah minimum naiknya 2 tahun sekali. Ini yang kebelinger, itu kan? Kalau naiknya per 1 tahun sih tidak apa-apa, tetapi naiknya cuman 8%.

Lanjut Pak.

Ya ini tentang upah.

Mungkin kita akan lanjut tentang sekilas mengenai jaminan pensiun.

Oh ya lanjut Pak.

Nah kenapa kami minta 30% kenaikan upah dan juga 500 ribu per bulan atau sama dengan Thailand dengan Manila, ya sebagai informasi saja, mungkin juga saya yakin Anggota Dewan yang terhormat sudah pahami bahwasanya hari ini Indonesia dalam G20 sudah masuk dalam 10 besar. Tahun lalu itu masih 15 besar tetapi tahun ini ketika Mei 2014 melalui Jubirnya Firmansyah, Jubir SBY pada saat itu bahwasanya Indonesia sudah tembus 10 besar dunia, ekonomi Indonesia sudah tembus 10 besar dunia.

Lanjut.

Juga Indonesia hari ini menjadi negara tujuan investasi, bahkan Jepang hari ini menginvestasikan terbesar di Indonesia, nomor 1, grafik menunjukkan bahwasanya kalau Tahun 2011 kita masih di bawah nomor 5, masih di bawah China, masih di bawah India, Thailand, Vietnam tetapi kita sekarang sudah menjadi nomor 1.

Lanjut.

Kemudian juga Pemerintah mengatakan tahun lalu akan membuka 20 kawasan industri baru di Jabar ada Tilamaya, Karawang. Pak Dede bisa cek juga Karawang menjadi tujuan investasi Jepang, Honda, Toyota, kemudian Yamaha semua nanti akan numplek di Karawang semua. Karawang itu menjadi luar biasa termasuk Karawang, Purwakarta terus ke Subang, terus ke Majalengka. Di Jawa Tengah, ada Kendal, Boyolali dan lain-lain. Jadi bohong sekali kalau investor akan kabur bohong. Faktanya, Pemerintah membuka 20 kawasan industri baru. 1 kawasan itu bisa ribuan perusahaan. Nah yang pindah itu adalah perusahaan-perusahaan yang ada di Jakarta, mereka pindah kalau yang padat modal mereka pindah karena di Jakarta sudah tidak ada lahan seperti Honda tadi, Honda, Yamaha, kaya apa segala macam, terutama otomatis pindah ke Karawang, pindah ke Bekasi segala macam, karena Jakarta sudah tidak ada lahan, mereka ingin perluasan, tetapi sudah tidak ada lahan. Nah ada yang pindah ke Jawa Tengah, itu rata-rata perusahaan tekstil, garmen, dan yang pindah ini bukan, mereka adalah bukan perusahaan yang benar tanda petik, mereka adalah broker-broker, mereka dapat, dapat apa namanya, dapat job, dapat order dari nike, dari jeans-jeans amerika, jeans eropa, mereka adalah perusahaan-perusahaan Korea yang sifatnya broker, mereka akan selalu mengejar dimana daerah yang buka kawasan industri baru yang upahnya murah, dari Jakarta pindah ke Bekasi, kemudian dari Jakarta pindah Sukabumi, Sukabumi mahal, kemudian pindah ke Subang, Subang mahal sekarang mereka pindah ke Semarang, Semarang mahal mereka pindah ke Kendal, Kendal mahal mereka pindah ke Banjar Negara dan lain-lain, terus saja. Jadi yang pindah broker, dan jumlahnya tidak besar. Yang pindah pun juga hanya pabriknya tetapi kantor pusat masih di Jakarta. Jadi ini ditetapkan kita. Jadi bohong benar kalau APINDO dan juga kalau ... mengatakan pindah, tidak, cek saja, kita cek ke perusahaan di KBN, karena KBN juga sebagian besar sahamnya saham pemda dan lain-lain.

Lanjut Pak.

Nah ini perbandingan upah di beberapa negara. Jadi kami tadi sampaikan Australia 42 juta, kemudian juga Jepang 25 jutaan, kemudian Korea 20 jutaan, Hongkong 10 jutaan,

tetapi untuk Indonesia cuman 2,4 juta. Itu yang di kotak merah. Banjar Negara hanya 0,9 juta, sangat rendah sekali grafik. Jadi penghargaan terhadap buruh Indonesia sangat rendah sekali. Ini sangat rendah sekali. Nah APINDO selalu mengatakan "Rus, tolong dibuatnya jangan masalah upah dong, kita bicara soal kompetensi. Oke, tidak ada masalah", tetapi pertanyaannya adalah kalau di Jepang hari ini hampir 80% mereka adalah S1, kemudian di Korea mereka juga besar S1, maka di Indonesia sebagian besar memang SD, SMP, tetapi pertanyaannya apakah kita pernah serius untuk bagaimana buruh bisa kuliah gratis. Lulusan SLTA kita cuman 1,5 juta per tahun, ya kalau kita ngomong kasar sekasar-kasarnya begitu kan, kalau mereka 1,5 juta kuliah ini dengan kuliah rata-rata sekitar 7,5 juta per semester atau 1 tahun itu 15 juta, maka untuk kuliah gratis itu hanya butuh per tahun itu sekitar 1,5 juta siswa dikali 15 juta cuman 22 Trilyun. Anggaran pendidikan kan ada sekitar 20% atau sekitar kalau 2015 sekitar 400 Trilyun. Artinya sebenarnya bisa buruh bisa kuliah gratis. Bukan buruh, lulusan SLTA setiap bisa kuliah gratis. Ini angka kasar begitu kan? Nah ini yang kita harapkan kalau memang Pemerintah serius ingin mengupgrade buruh Indonesia maka sekali lagi adalah lulusan SLTA, lulusan SMA, STM itu minimal yang pintar-pintar itu bisa kuliah gratis, tetapi hari ini faktanya adalah yang bisa kuliah di UGM, di UI, kemudian juga UNPAD, di UNDIP segala macam itu bukan anak-anak buruh, anak buruh tidak mungkin bisa kuliah Pak dengan gaji di Banjar Negara Rp900 ribu tidak mungkin bisa kuliah di UNDIP, dengan gaji di Jakarta, dengan gaji di Bandung misalkan 2 juta saja di Bandung, Kota Bandung, tidak mungkin mereka bisa kuliah di ITB maupun di UNPAD dengan kuliah dengan UMP 2,4 di Jakarta dan Depok, tidak mungkin bisa kuliah di UI. Nah inilah 1 yang harus kita coba selesaikan ke depan.

Lanjut Pak.

Ya upah naik , tetapi grafik yang disampaikan, ini juga analisis dari ILO juga. Ternyata secara riil upah itu tidak pernah naik, daya beli tidak pernah naik begitu.

Lanjut.

Ini problem juga. Sekitar 2011 ke bawah, mungkin Pak Dede sempat mengalami juga itu dalam penetapan upah minimum itu selalu berada di angka KHL Pak Dede, karena APINDO dan Pemerintah selalu mengatakan bahwasanya regulasi kita adalah bahwasanya UMP itu tidak harus 100% KHL. Ini sangat lucu kenapa suatu problemnya adalah survei KHL (Kebutuhan Hidup Layak) itu dilakukan tahun ini. Ambil contoh misalkan di Jakarta surveinya kemarin terakhir 2.538.000. Itu akan digunakan buat upah tahun depan. Nah di Tahun 2011 ke bawah KHL yang tidak resi tersebut, itu tidak pernah mencapai 100%. Bahkan di DKI hanya 80% saja, harusnya kan survei ini ditambah inflasi ya, baru riil tahun depan. UMP DKI 2,4 tahun ini. Faktanya, surveinya adalah riil 2,538. Artinya sebenarnya sudah minus dan di daerah lebih parah lagi, bahkan cuman 80% KHL dan lain-lain, ini membuat akhirnya upah kenapa selalu rendah. Ketika diluruskan, pasti naiknya tinggi, di Bogor misalkan Tahun 2012 itu cuman 1,2 tiba-tiba jadi 1,7, naik 60%, coba diluruskan metode berhitungnya, karena ada problem selama ini mafia upah murah bermain di hampir semua Bupati dan Kabupaten, bukan di Provinsi. Kalau Provinsi cuman tinggal tandatangan saja, terjadinya adalah di kabupaten dan rata-rata kabupaten/kota dan lain-lain. Nah ini problemnya.

Lanjut Pak.

Lanjut.

Ya ini sekilas tadi yang sudah saya sampaikan, 60 item itu tidak cukup, kemudian survei KHL tidak mencerminkan kebutuhan hidup layak, kemudian upah sering ditetapkan jauh di bawah KHL masih terjadi. Di Bali saja yang biaya hidupnya mahal itu upah masih sangat rendah sekali.

Lanjut.

Lanjut.

Ya tadi sekitar problem DKI, tekasi hanya 1.900 kemudian air hanya dihitung 9.000, satuan rafi hanya dihitung 5.750 per hari, kemudian daging hanya dihitung 4-7 ribu, ikan hanya dihitung 32 ribu ikan, kemudian pendidikan hanya dihitung 14 ribu saja, kopi hanya 12 ribu dan lain-lain.

Lanjut.

Lanjut.

Juga kemarin ada yang berkurang standard gramturnya sudah mulai berkurang. Kemarin DKI tidak mau mengubah, setelah kita demo baru berubah gramturnya. Kopinya yang harusnya 75 tetapi di pasar 65, kemudian susu bendera 900 hanya di pasar 800 gram, awalnya tidak mau diubah tetapi pakai standard kok dikecil, ternyata baru kita demo baru diubah.

Lanjut.

Ya ini sekitar pengupahan secara teknis dan detail dan sekali lagi adalah kuncinya kalau kebijakan atau regulasi tentang pengupahan tidak ubah, maka tiap tahun Bapak/Ibu sekalian dari mulai Oktober karena Oktober itu kalau untuk provinsi itu wajib 60 hari sebelum 1 Januari yaitu 30 Oktober sudah harus putus untuk provinsi seperti Jakarta inikan tidak ada, tidak ada UMK-nya, maka Jakarta harus putus 30 Oktober ... Kalau untuk kabupaten itu sekitar pertengahan November, sekitar 45 hari. Nah ini yang menjadi problem di upah. Makanya kami berharap besar ketika nanti mungkin Komisi XI juga memanggil Pemerintah, Pemerintah harus merevisi pengupahan, tetapi bukan yang upah naik 2 tahun sekali, kemudian juga harus mengubah kualitas, dan kuantitas dari 60 menjadi 84 item. Itu 84 item itu berasal dari Lembaga Survei Angka 3. Mungkin Pak Dede tahu angka 3 lokasi Lembaga Survei di Bandung sana.

Itu terkait dengan pengupahan.

Untuk terkait outsourcing, saya minta nanti Bung Yudi nanti untuk pengupahan tetapi sebelumnya Pak Sofyan akan menambah tentang pengupahan. Beliau adalah Wakil Presiden KSPI bidang Pengupahan.

Silakan Pak Sofyan.

**WAKIL PRESIDEN KSPI (SOFYAN A. LATIEF):**

Terima kasih.

***Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.***  
**Pak Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat,**

Ada beberapa kami hal, kami tidak.

**KETUA RAPAT:**

Maaf Pak Sofyan, saya harus memperkenalkan 1 Pimpinan saya yang hadir disini. Ini Pak Pius Lustrilanang. Beliau dari Fraksi Gerindra, mungkin sudah kenal juga semuanya.

Silakan teruskan.

**WAKIL PRESIDEN KSPI:**

Terima kasih.

Kami lanjutkan.

Juga kami mohon perhatian serius dari Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat. Yang pertama, mengenai Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2013 yang tadi sudah dipaparkan tentang Upah Minimum. Di dalam Peraturan Menteri No. 7 Tahun 2013 ini, ini cacat hukum. Kenapa saya katakan cacat hukum? Karena tidak sesuai dengan

ketentuan Pasal 1 butir 30 yang menyebutkan bahwa upah itu untuk pekerja dan keluarganya. Sementara tidak ada 1 pasal pun yang mengatur upah untuk pekerja lajang. Ini sudah lama sebenarnya cacat hukum ini. Nah ini kami mohon nanti kalau ada katakanlah mengundang Menteri Tenaga Kerja supaya diperbaiki dan kami mohon ini menjadi catatan penting, sebab kalau ini terus berlaku saya katakan tadi, dulu ini yang bertentangan dengan hukum ini terus berlanjut.

Yang kedua, di dalam Peraturan Menteri No. 231 tadi juga Tahun 2003 tentang Penangguhan. Penangguhan itu memang diatur di dalam Pasal 90 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003. Jadi perusahaan-perusahaan yang tidak mampu diberikan kesempatan untuk penangguhan dengan beberapa persyaratan, tetapi di dalam Peraturan Menteri No. 231 ini tidak disebutkan bahwa penangguhan sebagai hutang. Bahkan penangguhan itu berlangsung 6 bulan dan paling lama 1 tahun. Kalau ini penangguhan tidak disebut di dalam peraturan tidak disebut sebagai hutang berarti bertentangan dengan ayat sebelumnya, Pasal 90 ayat (1) menyebutkan "Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari Ketentuan Upah Minimum" dan sanksinya di Pasal 185 itu jelas pidana kurungan 1 tahun paling lama 4 tahun dan denda 100 juta paling lama 400 juta. Nah ini sudah berlanjut dari Tahun 2003 sampai Tahun 2003 ini tidak ada. Ini kami mohon yang serius dari anda, sebab sudah minimum ditangguhkan lagi. Bahkan tidak disebutkan sebagai hutang. Ini yang saya katakan proses kemiskinan.

Yang berikutnya, ini juga ada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 52 Tahun 2013 yang tadi sudah, tadi sudah disebutkan tadi hanya Inpres ya. Disana menyebutkan beberapa perusahaan yang dianggap padat karya, upahnya harus dibedakan. Sementara di dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tidak ada 1 pasal pun yang membedakan, mengklasifikasi ini perusahaan besar, perusahaan kecil dan sebagainya, pokoknya upah minimum itu berlaku untuk semua perusahaan. Nah ini juga tolong perhatian yang serius, karena ini adalah suatu aturan-aturan hukum yang membuat, memproses pekerja menjadi miskin.

Dan yang berikutnya adalah Inpres No. 9 Tahun 2013. Inpres ini membatasi, nah ini berkaitan tadi dengan Peraturan Menteri Perindustrian, berkaitan juga dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 7 Tahun 2003, karena dengan Inpres ini mereka betul-betul membatasi. Jadi dari Inpres ini karena ini sifatnya instruksi dan melibatkan aparat keamanan. Misalnya, Kepolisian. Jadi nah ada berdasarkan dengan Inpres ini, Menteri Perindustrian telah melakukan kerja sama dengan Kepolisian untuk mengawal Industri atau kawasan-kawasan yang dianggap sebagai obyek vital. Nah kami juga mohon nanti Komisi IX minta penjelasan yang kami sendiri juga tidak tahu yang dimaksud dengan obyek vital itu industri-industri apa saja, karena itu masuk kawasan-kawasan, apakah nanti kawasan-kawasan industri nanti termasuk industri vital.

Kemudian yang berikutnya juga kaitannya dengan Inpres tadi, karena di Inpres ini melibatkan Kepolisian, kemarin terjadi kerusuhan di Batam, demo itu 13 Anggota dari SPMBI yang merupakan aviliasi dari KSPI itu babak belur ditendang, diinjak dan sebagainya. Kami memang minta foto dan videonya supaya dikirim, nanti itu akan kami proses lebih lanjut. Nah ini tolong juga dengan demikian juga kami mohon 2 kepolisian dipanggil. Artinya, diminta penjelasannya oleh Komisi IX keterlibatannya jangan kayak orde baru lagi ini, mereka jadi dibacking-backing kayak begitu itu. Kalau mereka diminta untuk mengawasi ya mengawasi saja.

Nah itulah kira-kira tambahan dari kami. Yang paling penting sekali lagi, jadi peraturan-peraturan itu adalah suatu peraturan, suatu peraturan yang membuat pekerja menjadi miskin.

Saya kira itu.

Terima kasih.

***Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.***

**SEKJEN KSPI:**

Ya Pak Sofyan sebelum ke Bung Yudi, ada yang tertinggal yaitu tentang Jaminan Kesehatan. Jaminan Kesehatan sebagaimana amanat dari Undang-Undang BPJS secara substansi yang sering kami minta adalah, saat ini yang dicover oleh Pemerintah untuk katagori PBI (Penerima Bantuan Iuran) itu baru 86,4 juta dengan anggaran sebesar sekitar 16,7 dengan cadangan 19,4 Trilyun oleh DPR RI. Nah sesungguhnya lagi itu kami berdebat di ronde lalu, data dari TMP2K, data orang miskin itu sebesar 96 jutaan, 96 juta. Nah ini yang kami berharap besar, jumlah yang dicover oleh Pemerintah ini terus bertambah yaitu sebesar ya dilempengi 100 juta termasuk juga gelandangan, kemudian juga fakir miskin, termasuk juga Guru-guru honor, guru-guru honor anggota kami dari PGRI ini jutaan, Guru Honor, Guru PGRI, Guru Honor, Guru Madrasah, Guru TK, Guru PAUD yang mereka hanya digaji sebesar 200 ribu saja. Mereka dibidang miskin juga tidak miskin katanya tidak masuk katagori miskin kalau mereka lulusan S1 tetapi mereka hanya bergaji 300 ribu. Nah kami minta untuk kepesertaan PBI (Penerimaan Bantuan Iuran) atau Peserta BPJS yang iurannya dicover oleh Pemerintah sebesar Rp900.000,- per bulan ditambah dari 86,4 juta menjadi sekitar 100 jutaan yaitu dengan menambah tadi ya para guru honor, kemudian juga gelandangan yang masih banyak di jalan dan lain-lain, jadi ditambah, termasuk juga adalah buruh-buruh yang UMP gajinya termasuk di Jawa Tengah, di Jawa Barat, yang cuman 100 jutaan itu seyogyanya iurannya dicover oleh Pemerintah. Hitungan kami dengan iuran per bulan Rp19.000,- atau Rp20.000,- per bulan dikali 12 bulan, sesungguhnya kalau dikali 250 juta orang, seluruh Indonesia tercover BPJS seandainya itu hanya butuh tidak lebih dari 60 Trilyun. 60 Trilyun, tadi 20 ribu dikali 12 bulan dikali 250 juta orang Indonesia, ini 60 Trilyun. Undang-Undang Kesehatan itu amanahnya adalah 5% APBN, berarti 5% APBN itu adalah  $5 \times 20.000 \text{ Trilyun} = 100 \text{ Trilyun}$ , plus 10% APBD. Jadi lebih dari 150 Trilyun sesungguhnya anggaran untuk kesehatan walaupun nanti dipecah-pecah. Jadi kalau cuman gratis saja sebenarnya semuanya gratis pakai BPJS begitu kan, itu cuman butuh 60 Trilyun saja Pak Dede. Ya seluruhnya gratis Orang Indonesia dicover oleh BPJS, seluruh orang Indonesia mau yang kaya, miskin itu cuman butuh 60 Trilyun dari anggaran amanah APBN, 5% APBN dan 10% APBD itu ada anggaran, Pemerintah harus menyiapkan 150 Trilyun, semua gratis. Nah yang kami minta untuk tahap awal yang kami minta cukup 100 juta yaitu menambahkan yang sudah ada, kemudian menambah, ya termasuk adalah teman-teman PRT, termasuk teman-teman buruh migran dan keluarganya. Itu yang kami minta. Tolong didata, katanya sih lagi itu sudah by name by address, tetapi kami tidak pernah lihat, banyak yang double dan segala macamnya. Jadi bukan bikin Kartu Indonesia Sehat, karena sudah jelas BPJS sudah clear, ada payung hukumnya Undang-Undang SJSN dan juga clear bahwasanya yang dibutuhkan oleh masyarakat adalah bagaimana orang miskin tercover oleh BPJS. Nah baru kalau untuk yang kami kaum buruh, kami kaum buruh BPJS itu dicover oleh perusahaan bayar 4%, kemudian buruh bayar 1%. Nah problemnya adalah kami-kami yang selama ini sudah mendapat fasilitas pelayanan di Kelas I atau Kelas VVIP ini harus turun. Jadi kami yang berjuang BPJS, long march dari Bandung ke Jakarta demo 2 tahun dan saat itu begitu kan, tetapi hak ini kami sebenarnya secara umum, secara pelayanan kami turun. Nah ini kami juga buat kami, ini kami lagi coba cari solusi karena problem sekarang ini BPJS banyak yang rumah sakit belum mau kerja sama dengan BPJS. Problemnya adalah sistem tarif yang masih dianggap terlalu murah terlalu yaitu Permenkes No. 169 kalau tidak salah, No. 69 Tahun 2013 itu tentang Ina CBGs yang dianggap terlalu murah tarifnya, sehingga banyak rumah sakit, entah rumah sakit yang bagus itu tidak mau kerja sama dengan BPJS, efeknya adalah banyak Anggota kami mereka pakai BPJS tetapi ditolak dan sebagian dari kami bahkan belum masuk BPJS



karena tadi, sudah biasa VIP terutama teman-teman yang di perbankan, teman-teman telkom, teman-teman di Group Astra, di otomotif, selama ini mereka sudah VIP, masuk BPJS itu nanti masuk BPJS obatnya sama, tetapi kamarnya itu paling maksimal adalah kelas 1, untuk yang di bawah 2,7 itu kelas 2, itu turun. Nah memang ada COB, sistem namanya COB (Coordination of Benefit). Jadi kekurangan itu bisa dibayarkan oleh perusahaan secara langsung atau kerja sama dengan Asuransi, tetapi masalahnya asuransi belum menurunkan harga. Nah padahal 1 Januari 2015 seluruh perusahaan diwajibkan termasuk BUMN diwajibkan, tetapi masalahnya adalah COB-nya masih belum jelas. Nanti saya berharap besar ketika Teman-teman Komisi IX memanggil BPJS Kesehatan atau juga Depnaker atau Depkes bagaimana Sistem COB ini bisa clear termasuk jumlah kepesertaan dari BPJS untuk kategori orang miskin. Jadi sebenarnya tidak butuh lagi Indonesia Sehat dan ketika juga disampaikan oleh Pak Jokowi bahwasanya BBM naik, katanya sudah ada Kartu Indonesia Sehat, buat buruh tidak ngaruh, karena buruh sudah dibayarkan oleh perusahaan 4% dan buruh juga iuran 1%. Jadi tidak ngaruh. Jadi nanti oh nanti BBM naik, sudah ada Kartu Indonesia Sehat. Kemudian juga ada Kartu Indonesia Pintar, buat buruh tidak ngaruh, karena KHL tadi adalah untuk lajang. Jadi 3 kartu sakti Indonesia Sehat itu tidak ngaruh buat Buruh yang buruh-buruh yang mayoritas gajinya UMP, kemudian juga tidak ngaruh Kartu Indonesia Pintar karena rata-rata hitungan KHL tadi adalah untuk pekerja lajang, mereka belum punya anak termasuk juga Kartu Indonesia Sejahtera, sampai hari ini tidak pernah ada buruh yang menerima yang dulu namanya BLT atau hari ini Kartu Indonesia Sejahtera maka tadi kalau dibilang bagaimana sikap buruh terhadap BBM, Insya Allah kami tetap konsisten, kami sudah melakukan aksi sebelumnya untuk memutuskan buruh menolak kenaikan harga BBM. Karena sekali lagi adalah buruh yang kategori hari adalah near poor/mendekati miskin, dengan adanya kebijakan kenaikan bbm ini, buruh menjadi miskin. Dengan adanya gerakan bbm ini, maka kontrakan akan naik Rp100 ribu, transportasi akan naik sekitar Rp100 ribu dan efek domina buat sembako juga akan naik sekitar Rp180 ribu naik. Artinya buruh akan minus 380 ribu, tetapi kenaikan di Jakarta hanya 250 ribu minus sekali Pak, bagus kalau tidak ditanggihkan. Apalagi teman-teman yang kenaikan di Aceh cuman naik 8%, 8% dari 1,7 tidak lebih dari 180 ribu saja, maka kami pastikan bahwasanya hari ini kami dan sebagian buruh sudah melakukan aksi-aksi penolakan dan bahkan minggu lalu teman-teman sudah sempat tutup tol di Tol Rawasari setengah jam saja 2 jalur, mereka sudah tidur di jalanan Pak, mau ditabrak tidak apa-apa. kenapa? Ini kerja tetapi miskin, terus kita minta perubahan kesejahteraan, yang ada kado dari Jokowi adalah kado berupa kesengsaraan. Makanya kami kaitkan dengan awal lagi bahwasanya hari ini sebenarnya Pemerintah ini tidak jelas arahnya mau kemana. Pemerintah tidak punya grand design kesejahteraan, bukannya menambahkan daya beli tetapi justru mengurangi daya beli. Makanya Insya Allah Teman-teman sekarang diskusinya, makanya Ibu Irma, mana Ibu Irma, besok-besok katanya Teman-teman DKI mau nutup pelabuhan dan juga beberapa stasiun kereta, sudah nekat Pak, sudah nekat.

### **Salam Gigit Jari Pak.**

Ini kami sekali lagi adalah sikap kami dari KSPI ya seperti yang sudah kami sampaikan kepada Pak Dede dan juga Pak Wakil Ketua DPR RI Pak Fahri serta Pak Fadli Zon, sikap kami tegas bahwasanya kami menolak kenaikan bbm karena 3 kartu sakti itu sesungguhnya tidak berimpact kepada kaum buruh dan juga buat rakyat, karena termasuk Indonesia Sehat dananya sudah ada, sudah ada di Anggaran di APBN 2014 19,7 Trilyun, 16,7 Trilyun buat 8,4, kalau mau ditambah sudah ada dananya. Jadi bukan ambil dari kompensasi kenaikan BBM, ini kebohongan dan pencitraan.

Jadi sekali lagi adalah kami menolak kenaikan BBM.

Itu terkait jaminan kesehatan, kemudian terkait jaminan pensiun yang akan berlaku 1 Juli 2015 saat ini RPP-nya masih dalam proses diskusi di Lembaga Privatisasi Nasional, karena belum ketemu formulasinya. Teman-teman dari Pemerintah dan APINDO hanya mengusulkan iurannya itu 8% dengan manfaat bulanan yang diterima ketika pensiun nanti tidak lebih dari 25% saja dari upah terakhir. Kita tahu PNS itu terimanya adalah hampir 75% termasuk DPR juga, DPR RI juga pensiun terimanya hampir 75% dari gaji terakhir. Nah Pemerintah hanya menghitung manfaat bulanan dari pensiun yang akan berlaku itu pensiun itu jaminan pensiun sistemnya adalah tabungan dan asosiasi sosial. Kalau masih di bawah 15 tahun iur, ya itu kalau kita akan mulai 2015, maka itu akan berlaku 2015 ditambah 15 berarti 2030 baru akan berlaku. Jadi kita nabung terus ini dari 2015 sampai 2030 nabung. Kalau dia iurannya kurang dari 15 tahun, maka sifatnya tabungan. Ketika dia usia pensiun, belum iuran 15 tahun maka dia dapatnya lamsam tetapi kalau dia sudah mengiur di atas 15 tahun, hitungannya cuman 30%, ini tidak fair. PNS DPR RI dapatnya 75, kami minta juga paling tidak mendekati 75%, paling tidak 70%-lah.

Nah makanya kami kemarin mengusulkan iurannya itu adalah sekitar 18% dari buruh sekitar 3%, kemudian pengusaha 12% termasuk adalah ada dana kontingensi dari Pemerintah karena itu diatur juga dalam Undang-Undang BPJS, yaitu sebesar 3%. Nah kenapa kami minta 18% sedangkan pengusaha dan Pemerintah hanya 8%, karena selama ini yang sudah berjalan di Astra Group, kemudian juga ada di Indo Semen, kemudian juga, termasuk di BPJS Ketenagakerjaan di Jamsostek, itu iurannya rata-rata hampir 21%. Kemudian bagaimana di Singapura, Singapura itu pensiunnya sekitar 40%, 20% dari buruh, 20% dari Pengusaha. Bagaimana di Malaysia? Malaysia 23%, 12 dari Pengusaha, 11 dari kaum buruh. Jadi rata-rata termasuk juga di Vietnam, rata-rata pengusaha mengiur untuk pensiun dan 12%, tetapi konsep hari ini itu hanya 5% dari Pengusaha, belum lagi mereka minta kalau sudah ada pensiun katanya pesangon harus dihilangkan, JHT harus dihilangkan, pesangon adalah amanah dari Undang-Undang 13. Itu beda konsepnya. Nah ini yang masih perdebatan. Kami berharap nanti masalah jaminan pensiun juga menjadi salah satu topik yang akan dikaji oleh teman-teman Komisi IX, karena kami juga pasca upah ini kami akan aksi lagi tentang Jaminan Pensiun.

Itu saya pikir terkait dengan upah, jaminan kesehatan, dan juga jaminan pensiun. Untuk Outsourcing, Bung Yudi akan sampaikan. Dia dari Teman-teman Aliansi GEBER BUMN. Kemudian nanti untuk Isu PRT, Mbak Ita dari JALA PRT. Jadi, ada 2 isu lagi yang akan disampaikan.

Terima kasih.

***Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.***

Silakan Bung Yudi.

**KETUA RAPAT:**

Sebelumnya, saya mengingatkan tadi kan kesepakatan jam 12 tetapi kelihatannya masih ada beberapa, juga migrant care, saya usul pada Anggota Dewan kita tambah sampai 12.30 WIB bagaimana?

Ya, boleh ya?

Karena saya mohon nanti masing-masing supaya lebih mempercepat supaya kita pendalaman nanti lewat diskusi ya.

Terima kasih.

Saya ketok ya.

**(RAPAT : SETUJU)**

**KSPI (YUDI) :**

Baik.

Terima kasih Pimpinan dan juga Anggota dari Komisi IX DPR RI.

***Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.***

Saya Yudi Pak, saya dari FSPNI. Saya juga di KSPI sebagai Tim Penyelesaian Masalah Outsourcing terutama di perusahaan-perusahaan negara atau perusahaan-perusahaan BUMN dan juga bersama-sama dari Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja yang lain yang tergabung dalam gerakan bersama pekerja atau buruh outsourcing BUMN atau GEBER BUMN.

Terima kasih.

Pada kesempatan ini secara singkat saya akan sampaikan tentang outsourcing yang terjadi di Indonesia. Perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia ini baik itu perusahaan swasta maupun perusahaan milik negara atau BUMN, ternyata sejak Tahun 1996 mulai beramai-ramai menggunakan, bekerja atau buruh dengan sistem outsourcing. Tentang outsourcing sendiri atau sistem kerja outsourcing ini tidak lebih daripada kalau kita kenal zaman dahulu Pak, zaman nabi itu sistem perbudakan. Kesamaannya adalah kedua-duanya tidak mempunyai kemerdekaan, tidak mempunyai kemerdekaan dalam menentukan pekerjaannya dan mereka tidak bisa melawan atasan dalam segala hal karena mereka sangat menggantungkan dirinya kepada atasannya, sehingga atasannya itu seakan-akan dianggap Tuhan oleh mereka. Ini adalah sistem kerja yang jelas-jelas bertentangan dengan konstitusi negara kita Undang-Undang Dasar 1945 dan juga Undang-Undang 13/2003 tentang Ketenagakerjaan atau Perburuhan.

**Bapak-bapak/Ibu-ibu sekalian,**

Tentang outsourcing, kami sudah memperjuangkan dan alhamdulillah di perusahaan-perusahaan swasta itu sudah mulai mengubah yang melanggar atau yang tidak sesuai dengan aturan atau Undang-Undang 13/2003 itu mereka sudah mulai mengubah statusnya menjadi pegawai atau pekerja tetap di perusahaan masing-masing, tetapi sampai sekarang belum tuntas, masih banyak lagi perusahaan swasta yang masih menggunakan sistem kerja outsourcing ini. Nah ini ternyata mereka berkaca atau merefleksi kepada perusahaan-perusahaan milik negara. Jadi negara ini ironis, dia yang bikin aturan, membatasi sistem kerja outsourcing ini kepada 5 jenis pekerjaan saja tetapi kenyataannya di perusahaan-perusahaan milik negara sendiri menggunakan sistem kerja outsourcing ini di semua pekerjaan baik itu pekerjaan inti maupun pekerjaan penunjang.

Oleh karena itu, kami, kawan-kawan yang tergabung dalam GEBER BUMN yang juga menjadi bagian dari KSPI bersepakat untuk memperjuang berupa sistem aturan outsourcing tersebut menjadi pegawai tetap di Perusahaan-perusahaan BUMN ini, tetapi yang terjadi adalah sampai hari ini adalah yang terjadi bukannya diangkat menjadi pegawai tetapi justru mereka di-PHK dan sebagainya.

**Bapak/Ibu sekalian Anggota Komisi IX DPR RI yang saya hormati,**

Sekarang ini, persoalan-persoalan outsourcing adalah selain tidak punya masa depan, mereka juga menerima upah sering di bawah upah minimum karena apa? Karena kalau tidak mencapai target, upah mereka itu dipotong. Upah mereka itu upah minimum, begitu tidak capai target upah mereka dipotong. Jadi yang diterima akhirnya kurang daripada upah minimum. Itu yang sering terjadi di perusahaan-perusahaan BUMN diantaranya adalah Pertamina, ada PLN, PGN, Indofarma, Kimia Farma dan sebagainya.

Nah akibat dari upah dipotong itu dan upah yang minimum yang upah yang kurang dari upah minimum itu timbullah masalah-masalah ekonomi dalam keluarga mereka.

Kenapa upah mereka ini di bawah upah minimum, karena apa? Karena ada sistem outsourcing. Jadi kalau saya berikan gambaran misalnya dari BUMN dia sudah menganggarkan suatu pekerja atau buruh itu 4 juta, tetapi yang sampai ke Buruhnya tidak 4 juta, karena harus dipotong oleh perusahaan outsourcingnya itu. Jadi yang sampai ke buruhnya, upah minimum, yang nanti dipotong lagi kalau tidak dapat target, sehingga sisa daripada yang 4 juta dipotong upah minimum itu sisanya adalah masuk ke perusahaan outsourcing. Nah ini sistem yang sebenarnya tidak efisien, justru ini pemborosan, padahal itu adalah uang negara yang diambil dari APBN. Saya beri contoh misalnya PLN, PLN ini punya vendor-vendor untuk mengerjakan pekerjaan yang utama, pekerjaan inti yang harusnya tidak boleh outsourcing dan ironisnya adalah perusahaan-perusahaan outsourcing itu pasti kebanyakan didalamnya Pimpinannya adalah orang-orang mantan PLN sendiri. Ini juga terjadi di perusahaan-perusahaan BUMN yang lain, Pimpinan-Pimpinan dari perusahaan outsourcingnya itu pasti ada mantan dari Pimpinan-Pimpinan di Perusahaan BUMN. Itulah ironis dan yang terjadi sekarang banyak PHK, karena tidak punya masa depan, mereka bisa mudah di-PHK sehingga masalah-masalah keluarga juga banyak terjadi. Baru-baru ini saya juga mendengar dari Anggota kami terjadi perceraian dalam rumah tangganya, akhirnya mereka menjadi pengangguran dan sebagainya, menjadi masalah-masalah sosial di lingkungannya.

**Bapak/Ibu sekalian,**

Tentang pekerja outsourcing ini kalau kita bicara tentang kompetensi atau kualitas, mereka ini sungguh benar-benar berkualitas. Mereka bekerja puluhan tahun, sudah membuktikan pekerjaan, mereka mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan utama itu selama puluhan tahun. Tetapi yang terjadi sekarang justru Pemerintah itu mengevaluasi ulang, mem-PHK, melakukan tes untuk mendiskriminasi dan sebagainya. Padahal orang yang sudah puluhan tahun bekerja itu harusnya juga mampu membuktikan tentang kualitasnya, tetapi kenapa mereka harus dilakukan tes kembali. Nah ini yang terjadi sampai sekarang, yang kami masih menolak apa yang sudah dilakukan oleh pihak Pemerintah.

Itulah masalah-masalah pekerja outsourcing yang ada di BUMN dan mereka sampai hari ini beberapa dari mereka memperjuangkan, kenapa mereka berani berjuang, karena dari DPR RI sudah ada rekomendasi tentang outsourcing BUMN. Dalam rekomendasi itu sudah menegaskan, ini rekomendasi yang dibuat oleh Komisi IX, sudah menegaskan secara tegas bahwasanya seluruh pekerja outsourcing di BUMN ini harus diangkat menjadi pegawai di BUMN. Oleh karena itu, mereka berani melakukan perjuangan untuk mengawal rekomendasi yang dikeluarkan oleh Komisi IX tersebut, tetapi karena perlawanan itulah dari pihak-pihak Direktur BUMN, justru mereka tidak merasa senang, mereka tidak merasa senang karena mereka tidak mau menghilangkan vendor-vendornya itu, sistem pemborongan pekerjaannya itu, sistem pemborongan kerja itu mereka tidak mau menghilangkan. Makanya kami menduga kenapa mereka tidak mau menghilangkan, ya jangan-jangan memang dia tidak mau kehilangan kenikmatan mantan-mantan Pimpinan BUMN itu, bisa saja nanti ada setoran juga ke Meneg BUMN dan sebagainya, sehingga Kemeneg BUMN sampai sekarang mereka masih tidak melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan rekomendasi outsourcing BUMN tersebut.

Nah oleh karena itu, maka kami berharap dari Pimpinan Komisi IX dan juga Anggota Komisi IX pada kesempatan ini sekali lagi untuk mengadakan RDP dengan Pemerintah cukup sekali saja saya rasa, karena ini sudah sering berulang di materi yang saya sampaikan juga ada kronologis itu sampai terbentuknya panja, sampai hari ini apa yang terjadi, ya maka kami berharap dari Komisi IX kembali memanggil para Direktur BUMN yang bermasalah. Kemudian sekali lagi menegaskan bahwasanya mereka harus melaksanakan rekomendasi OS BUMN tersebut, karena yang terjadi sekarang mereka

menyelesaikan masalah OS ini versi mereka, versi mereka itu adalah mereka meminta semua buruh OS itu mendaftar kembali kepada vendor-vendornya, jadi tetap pakai sistem vendor, kemudian dites. Nah tes ini adalah sangat subyektif, sangat subyektif artinya dia bisa pilih mana orang yang dia mau dan mana orang yang dia tidak mau. Saya rasa semua kawan-kawan yang berjuang dalam penyelesaian OS BUMN ini saya rasa tidak akan ada yang masuk dalam tes atau tidak ada yang lolos dalam tes. Padahal dalam rekomendasi OS BUMN ini tegas tidak ada syarat apapun untuk diangkat menjadi pegawai tetap. Artinya, tidak ada tes dan sebagainya tetapi yang dilakukan sekarang adalah dengan tes, itu menurut versi mereka dan saya perlu mengingatkan bahwasanya mereka pasti akan beralasan ini adalah pemborongan pekerjaan.

**Bapak/Ibu sekalian,**

Dalam Undang-Undang memang ada 2 outsourcing itu, pemborongan pekerjaan dan pemborongan tenaga kerja. Nah mereka mengklaim ini bukan pemborongan tenaga kerja atau bukan outsourcing tenaga kerja tetapi ini outsourcing pekerjaan. Nah ini sebenarnya tidak sesuai dengan Undang-Undang. Namanya pemborongan pekerjaan itu tidak boleh pada pekerjaan inti. Nah saya beri contoh misalnya PLN. Orang yang pasang kabel, orang yang melakukan perbaikan-perbaikan, orang yang bekerja di gardu induk, itu sebenarnya pekerjaan inti, pekerjaan inti dari PLN tetapi semua dianggap itu pekerjaan yang bukan inti dan diborongkan oleh vendor-vendor, oleh PLN kepada vendor-vendor. Nah ini sebenarnya adalah kamufase atau tipuan-tipuan dari mereka saja, sehingga sampai sekarang mereka tetap mempertahankan sistem vendor itu. Nah ini yang tadi saya jelaskan ini sistem pemborosan, ya pemborosan anggaran.

Oleh karena itu, sekali lagi saya mengingatkan apabila ada alasan-alasan seperti itu, itu sebenarnya untuk mereka tidak mau melaksanakan rekomendasi. Nah saya berharap karena ini sudah hampir 2 tahun masalah ini rekomendasinya juga sudah berumur 1 tahun lebih belum ada realisasi, maka tidak ada cara lain ya saya berharap dari Komisi IX sekali lagi menegaskan kepada Direktur dari BUMN-BUMN dan juga dari Kemeneg BUMN untuk segera melaksanakan ini. Kalau tidak, maka kami berharap bisa digunakan hak interpelasi, panggil presiden, ditanya kenapa sampai hari ini tidak mau melaksanakan, karena sampai presiden baru dan menteri baru ini pun sampai hari ini tidak pernah menyinggung masalah outsourcing. Ya meskipun kami sudah melakukan aksi di depan Kantor Kemeneg BUMN setiap hari Senin dan hari Kamis selalu rutin untuk mengingatkan tetapi sampai hari ini belum ada respon apapun dan juga kami juga sudah datang beraudiensi dengan, nah ini kalau ada dari kawan-kawan dari Fraksi PDIP, kami sudah datang ke kantor, bertemu dengan Pak Hastu, saya dijanjikan, PDIP secara resmi sudah membuat surat ke Menteri agar melaksanakan rekomendasi tetapi saat ini belum ada tanda-tanda untuk direspon. Maka dari itu, saya berharap dari Teman-teman Komisi IX dan juga ada Fraksi PDIP yang kami bangga dengan Rakernasnya yang akan menyelesaikan masalah outsourcing itu segera untuk menindaklanjuti dan juga sebenarnya Pak Jokowi sendiri waktu menjadi Gubernur DKI sudah jelas tanda tangan dan kita ada buktinya tanda tangan mendukung rekomendasi OS BUMN ini, artinya buruh-buruh di OS BUMN harus segera diangkat menjadi pegawai tetap di BUMN. Itu Beliau tanda tangan juga pada waktu itu.

Siapa?

Saya tidak milih Pak, karena saya di Bekasi.

Presiden?

Rahasia itu Pak, rahasia.

Kalau memilih itu rahasia, nanti saya kena pasal.

Jadi itu demikian.

Saya berharap apa yang saya sampaikan ini bisa ditindaklanjuti dengan segera supaya tidak banyak lagi korban-korban dari rakyat terutama di Buruh-buruh OS BUMN.

Terima kasih.

***Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.***

**SEKJEN KSPI:**

Ya sebagai closing dari outsourcing Pak Ketua Komisi IX, disini penting sekali perusahaan BUMN harus tegas terhadap outsourcing. Kalau perusahaan BUMN-nya sendiri tidak tegas karena aturan yang ada, maka perusahaan swasta pun mereka tidak akan pernah mematuhi. Jadi sekali lagi menjadi yurisprudensi kalau BUMN saja negara tidak peduli terhadap Undang-Undang yang ada, maka ... Sebagai catatan, jumlah pekerja outsourcing setiap tahun makin meningkat. Yang sudah tetap ini seluruhnya di-PHK, pensiun dini, kemudian mereka ambil yang baru itu sifatnya adalah pekerja outsourcing, kontrak atau sekarang ini lagi marak yang namanya pemanjangan, kontennya sama yaitu konsepsi flexibility label market, pasar kerja yang fleksibel, bisa mudah masuk, dan bisa di-PHK.

.....:

Masukan Pak Ketua.

Sehubungan dengan waktu kita yang terbatas, barangkali untuk kawan-kawan KSPI kita sudahi dulu, kita persilakan untuk Migrant Care. Nanti mungkin diskusinya nanti Pak.

Terima kasih Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Kita berbagi waktu. Jadi nanti supaya diskusi sebelah sini sudah, terus nanti kesini lagi supaya dapat ya. Kasihan ini kawan-kawan Migrant Care dari tadi sudah ngantuk-ngantuk, kita bagi nanti kesini lagi, jadi biar dibalik saja begitu. Pada dasarnya kita semua akan mendengarkan semua kok.

Ya makanya, kan karena dari PRT dengan Migrant Care kan kurang lebih nanti isinya hampir sama ya, kita bagi saja karena tadi sudah 1,5 jam dari KSPI, sekali lagi disini, nanti kita perdalam lagi dengan kawan-kawan dari.

**F-PD (dr. VERNA GLADIES MERRY INKIRIWANG):**

**Pimpinan,**

Kanan.

Usul saja Pimpinan dari saya agar, karena tadi kan sudah diketok sampai 12.30 WIB, berarti sekarang kalau kita berikan kesempatan kepada migrant care, kita tetapkan waktunya berapa lama, kemudian untuk diskusi berapa lama supaya jalannya acara kita pagi ini tidak simpang siur dan ada patokan waktunya. Jadi tidak kita lepas saja, tetapi kita beri waktu berapa lama untuk migrant care, kemudian berapa lama untuk kita diskusi.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Ya, terima kasih.

Jadi sebagaimana yang tadi sudah saya sampaikan, untuk Migrant Care saya kasih waktu 15 menit untuk persentasi.

Cukup atau kurang 15 menit ya?

Nanti kemudian kita lanjutkan lagi, karena 12.30 WIB tinggal setengah jam lebih lagi. Jadi nanti 12.30 WIB saya lihat apakah perpanjangan waktu kita lakukan atau tidak.

Saya persilakan dulu ini dari Migrant Care.

Silakan.

### **MIGRANT CARE (WAHYU SUSILO):**

Terima kasih Bapak Pimpinan, Pak Dede Yusuf dan Mas Pius, kebetulan teman lama saya.

Untuk isu di sektor buruh migran, memang ini sektor yang selama ini terpinggirkan.

Pertama, nama saya Wahyu Susilo. Saya di Migrant Care sebagai analis kebijakan. Nah kebetulan kemarin kami juga meluncurkan Global Slavery Index bersama teman-teman Walk Free. Disini, ada Ibu Kathrine Bryan dari Walk Free Foundation, Walk Free itu organisasi melawan perbudakan modern se-dunia. Kemudian ada Mas Tomi Yuliwan dari Sahabat Insan Migran. Kemudian yang di belakang Ibu Badriyah juga dari Migrant Care, kemudian Mbak Vero dari PDHPI, juga ada 2 staf Migrant Care Humairoh dan Dede dari Migrant Care.

Nah kebetulan kami kemarin baru saja meluncurkan bersama-sama teman-teman Walk Free situasi perbudakan se-dunia dan kalau harga BBM itu naiknya hanya 30%, angka perbudakan modern yang diderita oleh warga Indonesia itu meningkat 300%. Jadi ini realitas. Jadi rakyat menghadapi kenaikan BBM tetapi juga warga Indonesia baik yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri dan juga pekerja-pekerja di sektor yang lain itu mengalami praktek perbudakan dan peningkatannya tajam sekali, 300%, juga teman-teman outsourcing karena kami dulu juga berkampanye dengan teman-teman yang mengalami praktek outsourcing dan itu sebenarnya juga merupakan praktek perbudakan modern.

Nah nanti untuk soal Slavery, saya memberikan kesempatan kepada Bu Chat tetapi kami ingin langsung memberikan 10 rekomendasi. Mungkin langsung ke rekomendasi pertama soal buruh migran.

Yang pertama, kami ingin merekomendasikan baik kepada pemerintahan baru maupun ke parlemen yang baru, bahwa harus memastikan bekerja ke luar negeri adalah hak untuk mendapatkan pekerja yang layak. Ini memang kontradiktif. Tadi Mas dari KSPI bilang bahwa Indonesia sudah masuk 10 besar negara ekonomi terbesar karena kita juga Anggota G20 tetapi ironisnya Indonesia masih merupakan negara yang bertumpu pada perolehan pada remiten, uang kiriman devisa TKI kita dan ironisnya juga penghasil dari remiten ini mendapatkan perlakuan yang tidak layak. Nah data terbaru dari Bank Dunia menyatakan bahwa angka bantuan luar negeri dibanding dengan uang kiriman remiten TKI kita itu lebih banyak uang kiriman TKI kita, 3 kali lipat tetapi bagaimana kita perlakuan kita menyambut donor asing, menyambut pejabat-pejabat luar negeri yang datang ke Indonesia membawa utang itu dengan karpet merah, tetapi kalau TKI kita yang uangnya disumbang 3 lipat, itu praktek eksploitasi yang terjadi di terminal kepulangan TKI setidaknya sampai Bulan Oktober kemarin itu sangat berbeda sekali itu, sangat diskriminatif, sehingga kami merekomendasikan bahwa bekerja ke luar negeri adalah hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, karena juga seperti tadi disampaikan oleh Teman-teman KSPI, kondisi pekerja di dalam negeri tingkat upah yang rendah, mereka masih merasa in job security, merasa keamanan kerjanya juga tidak terjamin, satu-satu pilihan adalah bekerja ke luar negeri. Rekomendasi yang kedua adalah mengakhiri industrialisasi. Jadi praktek industrialisasi dalam penempatan buruh migran dan PRT migran di Indonesia. Di bawah Undang-Undang 39 Tahun 2004 itu memberikan kewenangan yang penuh kepada PPTKIS, kepada PJTKI untuk melakukan segalanya disitu. Padahal kalau kita kupas lebih lanjut PPTKIS itu

adalah entitas hukum berbentuk perseroan terbatas. Kenapa tidak diatur dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas tetapi diatur secara khusus Undang-Undang, namanya Undang-Undang Penempatan dan Perlindungan TKI tetapi 100 lebih pasal itu bicara tentang penempatan, sehingga kalau kita baca ataupun kita ikuti yudisial review teman-teman TKI di Mahkamah Konstitusi ini selangkah demi selangkah memereteli pasal-pasal di dalam Undang-Undang 39/2004. Yang terakhir adalah Mahkamah Konstitusi memutuskan Pasal 59 tentang kewajiban TKI kontrak dan harus melalui PJTKI lagi dicabut karena Pasal itu terkesan sangat atau memang terkandung pasal diskriminatif begitu. Mereka di luar negeri bisa melakukan kontrak mandiri, diperbolehkan oleh negara setempat tetapi kok oleh Undang-Undang 39/2004 mereka harus dipaksa pulang, memproses lagi melalui PJTKI, harus membayar 21 juta lebih hanya untuk mendapatkan stempel PJTKI dan mereka baru bisa berangkat. Untung pasal ini kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Kemudian yang ketiga, rekomendasi yang ketiga adalah memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap hak-hak buruh migrant. Nah Teman-teman Periode yang lalu 2009-2014 itu telah melakukan atau memproses ratifikasi Konvensi Perlindungan Buruh Migrant dan Anggota Keluarganya dan itu tertuang di dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2012. Nah disitu juga tercantum seluruh hak-hak yang dimiliki oleh Buruh Migrant dan Anggota Keluarganya. Nah kami mendesak juga teman-teman DPR memastikan bahwa segenap hak yang terkandung di dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2012 itu juga menjadi panduan bagi kebijakan perlindungan buruh migrant Indonesia yang ada di luar negeri dan seharusnya juga Undang-Undang No. 6 Tahun 2012 juga menjadi substansi dari yang nantinya akan ada revisi Undang-Undang 39/2004. Jadi Migrant Care berharap tahun depan itu revisi atau perbaikan Undang-Undang 39/2004 menjadi salah satu prioritas dari prolegnas yang akan dilaksanakan DPR RI Tahun depan.

Nah rekomendasi keempat adalah mendekatkan akses atas keadilan, akses terhadap bantuan hukum misalnya. Sampai sekarang, kalau kemarin kami bertemu dengan pihak kementerian luar negeri, masih ada 249 buruh migrant kita yang terancam hukuman mati, yang kasusnya itu belum selesai, ada yang masih dalam proses peradilan, 23, tepatnya itu sudah mendapatkan vonis tetap. Nah yang 23 orang ini kita berhadapan, teman-teman DPR RI juga mendesak Pemerintah Indonesia terutama di High Level di Menteri Luar Negeri dan Presiden untuk melakukan diplokasi tingkat tinggi, karena hanya dengan diplomasi tingkat tinggilah mereka itu bisa dibebaskan karena vonis hukumnya vonis hukum sudah vonis hukum yang final. 249 mereka yang dalam proses peradilan dan saya kira memang mendekatkan mereka pada akses terhadap hukum itu sangat mutlak. Misalnya pengalaman kami juga bersama waktu itu bersama Bang Pius waktu memantau sidang wil prida itu ketika kita tidak melakukan pemantauan, teman-teman tidak melakukan pemantau wil prida di sidang tanpa penerjemah, tanpa pengacara, baru ketika kita meributkan, teman-teman di DPR juga meributkan proses persidangannya kemudian diubah. Jadi kita ingin, karena ini soal nasib warga negara kita. Kalau kita dengar apa yang dikatakan oleh Menteri Luar Negeri bahwa diplomasi mereka diplomasi pro rakyat, saya kira yang paling depan, yang paling duluan juga harus diperhatikan adalah nasib TKI kita yang ada di luar negeri.

Yang kelima adalah mengakhiri seluruh kebijakan yang diskriminatif. Nah salah satu hal yang sudah dilakukan tetapi juga tetap perlu mendapatkan monitoring adalah penutupan terminal khusus TKI karena misalnya pada sejak Bulan Juli sampai Bulan September, Teman-teman KPK, UKP4, kemudian juga teman-teman BNP2TKI melakukan evaluasi terhadap terminal kepulangan TKI dan dinyatakan bahwa terminal ini kemudian ditutup tetapi kita tidak tahu kemudian apakah dalam prakteknya ini masih terjadi begitu.

Jadi yang keenam memastikan seluruh kebijakan migrasi tenaga kerja itu berstandar pada hak asasi manusia dan konvensi-konvensi terkait, Konvensi ILO. Indonesia sebenarnya merupakan sedikit dari Negara Asia yang meratifikasi secara



lengkap 7 standard pokok perburuhan seperti itu tetapi kita juga mengingatkan bahwa ratifikasi tidak hanya sekedar tanda tangan tetapi harus terimplementasi di dalam kebijakan itu.

Kemudian rekomendasi yang tujuh adalah, saya kira nanti juga Mbak Lita akan berbicara banyak soal ini, segera meratifikasi Konvensi ILO 189 tentang Kerja Layak bagi Pekerja Rumah Tangga seperti juga yang kemarin kami lakukan bersama Teman-teman WORKI, hampir sebagian besar praktek-praktek perbudakan modern itu lebih banyak dialami oleh teman-teman yang bekerja di sektor pekerja rumah tangga baik mereka yang perempuan, banyak juga yang anak-anak. Jadi urgensi kita meratifikasi konvensi ini harus juga ditindaklanjuti dengan misalnya Undang-Undang khusus tentang perlindungan pekerja rumah tangga.

Kemudian rekomendasi yang kedelapan adalah membangun paradigma migrasi yang aman bagi perempuan. Jadi kalau pemerintah yang dulu membangun road map akan menghapus pekerjaan PRT Migrant ke luar negeri, pertanyaannya adalah apakah Pemerintah kita mampu memberikan lapangan kerja yang layak buat mereka semetara tadi sudah disampaikan realitas pekerjaan di dalam negeri dengan tingkat upah yang ternyata paling rendah kita masih menganut politik murah dan mereka masih berada dalam posisi yang in job security. Jadi saya kira road map untuk menghapus pekerja rumah tangga ke migrant ke luar negeri itu bukan jalan keluar. Yang dipastikan harusnya adalah negara hadir. Saya kira kalau kita selalu mendengar apa yang dikatakan oleh Presiden Jokowi, dikatakan bahwa negara harusnya hadir tetapi kalau road map ini akan dilaksanakan lagi karena kita dengar kemarin Kemenaker akan menjalankan road map ini, negara bukan hadir tetapi negara menghindari dari tanggung jawab untuk melindungi PRT Migrant. Jadi kami berharap mungkin kalau nanti teman-teman di DPR memanggil Menteri Tenaga Kerja, harus dipastikan bahwa yang harus dilakukan adalah melindungi PRT Migrant bekerja secara aman di luar negeri, bukan menghalangi mereka untuk bekerja karena kalau negara melindungi itu negara hadir, kalau menghalangi itu negara menghindari dari tanggung jawab mereka.

Kemudian rekomendasi yang kesembilan adalah membangun tata kelola migrasi yang akuntabel dan transparan. Pada pemerintahan di masa lalu itu 2 kementerian dan badan yang terlibat langsung dalam penempatan TKI ini menurut survei pelayanan publik yang dilakukan oleh KPK dalam pelayanan terhadap Buruh Migrant, pelayanan kepulauan itu mereka berada pada peringkat terendah untuk ... Itu terjadi karena masih banyak praktek suap, masih ada banyak praktek-praktek korupsi di sektor ini begitu. Jadi kita juga selain negara hadir dalam diplomasi perlindungan mereka, tetapi juga mengubah tata kelola migrasi yang akuntabel dan transparan seperti itu, kemudian juga melakukan desentralisasi tanggung jawab negara, karena yang terjadi sekarang adalah sentralisasi penempatan TKI kita hampir semua TKI diproses di Jakarta padahal 90% mereka ada di daerah-daerah sehingga kita dapati di kawasan-kawasan condet, tebet seperti yang kemarin dipanjat oleh Menteri, itu ada penampungan-penampungan yang kondisinya sangat tidak layak. Nah kalau ada desentralisasi penempatan itu, Pemerintah Daerah punya tanggung jawab, mereka juga punya ownership di dalam perlindungan TKI kita.

Dan yang terakhir adalah soal bagaimana negara itu juga memastikan migrasi tenaga kerja memiliki dampak terhadap kesejahteraan buruh migran dan anggota keluarganya. Sampai sekarang meskipun remintensi kita setiap tahun meningkat, tetapi Pemerintah kita terutama Kemenaker tidak punya management remintensi yang bagus. Jadi saya buat perbandingan 5 tahun yang lalu Vietnam belajar tentang tata kelola penempatan TKI kita ke, tata kelola penempatan buruh migran ke luar negeri, mereka baru memulai. Jadi Teman-teman NGO, Teman-teman Kemenaker Kemenakertrans itu datang ke Vietnam memberikan asistensi kepada mereka tapi situasinya berubah sekarang.

Mereka punya tata kelola yang lebih baik. *Remittance* yang mereka terima itu lebih banyak jadi mereka masuk Top 10 *Remittance* 10 besar dunia, Indonesia belum masuk itu padahal Indonesia mengirim paling banyak, lebih banyak TKI nya dari Vietnam. Ini terjadi karena kalau Vietnam menempatkannya dengan diplomasi, kamu mau tidak bayar upah sekian, dengan upah yang layak tapi kalau yang dilakukan Indonesia sampai sekarang adalah mematikan pasar. Ketika Filipina, Sri Lanka itu menetapkan upah yang layak, Indonesia mau main memasarkan tenaga kerja upah dibawah standar itu. Jadi kadang-kadang kita dimusuhi oleh negara-negara pengirim buruh migran yang lain karena kita selalu mematikan pasar mereka dengan politik upah murah mereka.

Kalau negara punya tata kelola terhadap penempatan, terhadap remitensi, sebenarnya juga ini akan terkelola dengan baik. Daerah-daerah akan, ekonomi regional akan lebih tergerakkan karena yang terjadi sekarang remitensi lebih banyak masih dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan konsumtif.

Saya kira itu, mungkin saya berikan kepada Mbak ...

**MIGRANT CARE/WALK FREE (KATHARINE BRYANT):**

*Good afternoon everyone.*

*Thank you for your opportunity to talk to you today about the global slavery index.*

**PENERJEMAH (MIGRANT CARE):**

Selamat sore teman-teman semua dan kami akan melaporkan *global slavery index* atau indeks perbudakan dunia.

**MIGRANT CARE/WALK FREE:**

And I came here today from the Walk Free Foundation which is a global anti slavery organization basis in Australia.

**PENERJEMAH (MIGRANT CARE):**

Kami berasal dari Walk Free Foundation, sebuah organisasi yang bermarkas di Australia.

**MIGRANT CARE/WALK FREE:**

And we are also author of Global Slavery Index and this is the second edition of this report.

**PENERJEMAH (MIGRANT CARE):**

Kami juga yang menulis indeks perbudakan global ini dan ini adalah edisi yang kedua.

**MIGRANT CARE/WALK FREE:**

This report i'm suggesting three things that i'm to estimate the number frequence slavery.

**PENERJEMAH (MIGRANT CARE):**

*Report* ini melaporkan tiga hal. Yang pertama adalah menduga berapa banyak orang yang menjadi korban perbudakan di dunia.

**MIGRANT CARE/WALK FREE:**

Second, i'm stressed governance faces to the problem.

**PENERJEMAH (MINGRANT CARE):**

Yang kedua adalah mengukur sejauh mana respon pemerintah terhadap masalah ini.

**MIGRANT CARE/WALK FREE:**

And also third is giving education of kind of the fact that is caused individual ... slavery.

**PENERJEMAH (MINGRANT CARE):**

Dan yang ketiga mengidentifikasi faktor-faktor yang membuat orang rentan terhadap perbudakan.

**MIGRANT CARE/WALK FREE:**

When we talk about morning slavery, we talking about things like force labour, human trafficking, forced marriage, and etc. So that's all the definition of morning slavery we used as number of the ten, the .. those three main and international and definition.

**PENERJEMAH (MINGRANT CARE):**

Ketika kita berbicara perbudakan, yang dimaksud adalah kerja paksa, kawin paksa, eksploitasi seksual dan beberapa hal yang sejenis itu, itu yang dimaksud dengan perbudakan dalam laporan kami.

**MIGRANT CARE/WALK FREE:**

*And this year in Indonesia, we found there are approximately 714.100 people estimated the...*

**PENERJEMAH (MINGRANT CARE):**

Saat ini kami memperkirakan di Indonesia ada sekitar 714.100 orang yang menjadi korban perbudakan modern.

**MIGRANT CARE/WALK FREE:**

*And we came ... by conducting a national representative random sample slaver.*

**PENERJEMAH (MINGRANT CARE):**

Kami mendapatkan angka ini dari hasil melakukan survey secara *random* di tingkat nasional.

**MIGRANT CARE/WALK FREE:**

*This mean that we used sensus data to indentified about 1000 household to ident ...*

**PENERJEMAH (MINGRANT CARE):**

Ini artinya kami memakai data sensus untuk mendapatkan 1000 rumah tangga yang kemudian kami survey menggunakan jasa World Paul, Gallop Paul.

**MIGRANT CARE/WALK FREE:**

*and the type of model slavery that we found were ... effective migrant workers, that's why we're saying about domestic workers overstays.*

**PENERJEMAH (MIGRANT CARE):**

Kebanyakan korban yang kami jumpai adalah mereka yang bekerja di sektor rumah tangga yaitu pekerja rumah tangga migran seperti yang dikatakan tadi.

**MIGRANT CARE/WALK FREE:**

*But also some cases in Indonesian workers being exploited within Indonesia particullary in agricultural sectors including the palm oil industry.*

**PENERJEMAH (MIGRANT CARE):**

Tetapi juga ada orang-orang Indonesia yang menjadi korban perbudakan di dalam negeri terutama mereka yang bekerja di sektor pertanian seperti kelapa sawit.

**MIGRANT CARE/WALK FREE:**

*And inline with migrant ... being saying already... recommendation ... are to retify ILO Convention 189 which provide protection for domestic workers.*

**PENERJEMAH (MIGRANT CARE):**

Oleh karena itu rekomendasinya adalah seperti yang dikatakan *migrant care* tadi adalah meratifikasi Konvensi ILO 189.

**MIGRANT CARE/WALK FREE:**

*And also to house domestic legislation that reflect these protection in international law.*

**PENERJEMAH (MIGRANT CARE):**

Dan kemudian adalah dengan membuat Undang-Undang untuk melindungi hak-hak orang-orang ini.

**MIGRANT CARE/WALK FREE:**

*And consist of time so i stopped by but that is a briefe a kind ...*

**PENERJEMAH (MIGRANT CARE):**

Saya sadar waktunya tidak banyak, maka saya akan berhenti disini saja dulu.

**KETUA RAPAT:**

Oke, karena tadi *migrant care* menyebutkan. Benar ya dari *migrant care* menyebutkan ada soal PRT mungkin disini dari ... silakan. Tapi kita semua sambil berhemat waktu juga jadi nanti kalau 12.30 WIB kita bisa perpanjang, saya akan minta izin dahulu

dengan teman-teman. Bagaimana kira-kira masih mau diperpanjang? Karena kita masih diskusi nanti.

**KPRTBM (KOMITE AKSI PERLINDUNGAN PEKERJA RUMAH TANGGA DAN BURUH MIGRAN)/JALA PRT (LITA ANGGRAINI):**

Saya sebentar saja Pak.

**KETUA RAPAT:**

Sebentar ya? Oke, baik.

**KPRTBM / JALA PRT (LITA ANGGRAINI):**

Terima kasih kepada Pimpinan DPR dan para Anggota. Pimpinan Komisi IX maksud saya.

Kami dari KPRTBM (Komite Aksi Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dan Buruh Migran) yang terdiri dari Jala PRT, kemudian jaringan buruh migran dan konfederasi termasuk salah satunya KSPI.

Pertama kami menyampaikan bahwa kami memperjuangkan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga sejak tahun 2004 hingga tahun 2014, 10 tahun, 2 kali periode DPR, 2 kali periode pemerintah, tidak juga menjadi Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga padahal undang-undang ini mendesak dan penting untuk pemenuhan hak-hak dan kesejahteraan dari pekerja rumah tangga yang berjumlah menurut kami paling tidak dari ... Jala, lebih dari 10,7 juta.

Dan yang kedua soal ratifikasi Konvensi ILO 189, karena berisi tentang standar situasi kerja layak PRT dan ini penting untuk perlindungan baik itu pekerja rumah tangga yang di dalam negeri dan migran sebagaimana waktu itu Presiden SBY sendiri mengatakan bahwa dalam pidatonya di Sidang Perburuhan Internasional 14 Juni 2011 mengatakan bahwa akan menjadikan Konvensi ILO 189 ini sebagai acuan dalam penyusunan RUU PRT ataupun di dalam penyusunan amandemen Undang-Undang perubahan, Perubahan dari Undang-Undang 39 Tahun 2004 karena mayoritas dari buruh migran adalah pekerja rumah tangga migran dan karenanya kami mendesak agar singkat saja karena tidak perlu mengulang-ulang, agar RUU PRT dan ratifikasi Konvensi ILO 189 dan amandemen RUU 39 menjadi prioritas dari Prolegnas 2015 dan untuk segera dibahas dan ditetapkan karena RUU PRT sampai sekarang masih di Baleg dan macet dari pembahasan terakhir Juni Tahun 2013 dan waktu itu September diagendakan di Baleg dan Komisi IX akan membahas bersama tetapi itu tidak kunjung terjadi. Jadi kami mohon kepada Komisi IX untuk memperjuangkan RUU PRT dan ratifikasi Konvensi ILO 189 untuk segera diselesaikan karena ini kurang 3 tahap lagi dan itu penting. Itu saja permintaan dari kami.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Baik, terima kasih atas semua informasi yang telah diberikan. Untuk itu sekarang kami akan memberikan kesempatan kepada teman-teman Anggota untuk memperdalam. Kepada kawan-kawan, tamu undangan kita. Disini sudah ada 4 yang mendaftarkan. Ibu Verna, Pak Hamid, Ibu Siti dan Pak Zulfikar untuk sekarang ini ya. Maaf, kami kedatangan Anggota baru juga. Nanti ibu kalau mau bertanya silakan juga.

Baik, saya persilakan Ibu Verna.

**F-PD (dr. VERNA GLADIES MERRY INKIRAWANG):**

Terima kasih Pimpinan.

**Bapak dan Ibu dari KSPI maupun dari Migran Care yang saya hormati, serta Rekan-rekan Komisi IX yang saya cintai.**

Kami sangat senang bahwa hari ini tentu saja bisa mendengar masukan juga bisa mendengar "uneg-uneg" dari kawan-kawan dari KSPI maupun dari Migran Care bahwa memang betul semua masalah-masalah, semua uneg-uneg yang sudah diutarakan tadi pastinya kami sebagai Komisi IX periode ini akan kami tampung dan tentu saja kami pun berharap di waktu yang akan datang ini bisa kita kawal dan bisa tentu saja kita awasi bersama.

Tadi kalau saya tangkap dari KSPI mungkin ada masalah yang terkait dengan masalah pengupahan dan KHL ya. Kemudian masalah *outsourcing*, masalah jaminan kesehatan dan jaminan pensiun serta implikasinya dari kenaikan BBM yang terhadap buruh tentu saja. Ini sudah kami serap dengan cukup baik dan tentu saja ke depan kami memohon karena ini, RDP ini sifatnya tentu saja kami Komisi IX menerima masukan, mendengar masukan untuk kemudian nanti pada saat kami rapat baik dengan Kemenaker maupun dengan BPJS nanti, DJSN akan tentu saja kami sampaikan kepada pihak-pihak yang terkait untuk kami perjuangkan.

Dan tadi terkait masalah *outsourcing*. Memang masalah *outsourcing* dari Anggota DPR periode yang lalu ini juga sudah ada rekomendasinya tetapi memang Pimpinan agak tersendat dan mungkin kenapa juga tidak bisa karena ini memerlukan koordinasi lintas kementerian tentu saja dan ini tentu saja memerlukan peran yang sangat aktif dari Pimpinan untuk berkoordinasi dengan Pimpinan Komisi VI ya. Dan ini memang pada periode yang lalu cukup agak sedikit tersendat karena beberapa kali pun Komisi IX memanggil Pak Menteri untuk kami tanyakan, kalau tidak salah satu-dua kali saja ya yang sempat hadir tapi setelah itu untuk *follow up* nya agak susah. Jadi ini memang kami sampaikan pada Pimpinan untuk lebih diperhatikan sehingga ini bisa benar-benar kita kawal. Masalah *outsourcing* yang sudah Komisi IX rekomendasikan untuk diangkat pegawai *outsourcing* untuk diangkat menjadi pegawai tetap. Betul sekali tadi kata teman-teman dari KSPI bahwa di perusahaan BUMN saja masih sangat kurang seperti ini. Bagaimana ini menjadi cerminan untuk perusahaan-perusahaan swasta melihat sehingga harusnya ini menjadi suatu contoh yang baik dan bisa menjadi *role model* sehingga yang perusahaan swasta pun bisa memperlakukan atau bisa *men-threat* para buruh kita dengan lebih baik tentu saja.

Dari penegakan hukum tentu saja ke depannya akan lebih kami perhatikan. Intinya dari masalah-masalah yang sudah atau uneg-uneg yang sudah diutarakan oleh KSPI tentu saja akan kami tampung dan bersama-sama kita minta untuk kita mengawal ke depannya. Prinsip pemerintahan yang baru ini kita belum mendengar ada komentar tentang buruh atau tentang *outsourcing* seperti tadi yang sudah dikatakan, kita tunggu saja tetapi tentu saja kita tetap bekerja seperti hari ini, inisiatif yang baik dari Pimpinan Komisi kami untuk RDP dengan bapak/ibu semua yang hadir disini dan tentu saja walaupun belum ada solusi atau belum ada hal-hal yang terkait dari pemerintah tentang para buruh atau tenaga kerja, tentu saja akan kami terus *follow up*.

Kemudian untuk Migran Care sudah kami tampung tentu saja dan sebenarnya saya ingin mengapresiasi juga 10 rekomendasi yang sudah diberikan dan ini pastinya sebuah masukan yang sangat baik bagi kami di Komisi IX dan ini akan kami kawal terus dan akan kami sampaikan pada saat nanti kami rapat dengan pihak yang terkait.

Dan kalau masih ada waktu Pak Ketua, kan Migran Care juga terkait dengan Undang-Undang prioritas yang kemarin sudah kita tetapkan tentang RUU PPILN dan mungkin kemarin pada saat rapat sudah pernah ya, pada saat dibahas periode lalu Migran Care sudah mungkin memberikan masukan. Tidak ada salahnya kan ini merupakan

Anggota periode yang baru, boleh sedikit diberikan masukan juga terkait undang-undang ini sehingga pada saat nanti kami meneruskan anggota-anggota yang baru ataupun kami yang kemarin tidak masuk di Panja dan Pansus RUU PPILN ini bisa lebih mendapat pencerahan atau bisa mendapat masukan apa sih yang dari Migran Care yang baik itu atau masukan apa yang diberikan kepada kami untuk kami tentu saja melanjutkan dengan cepat mudah-mudahan tentang RUU PPILN ini.

Itu saja dari saya ketua. Terima kasih.

#### **KETUA RAPAT:**

Terima kasih Bu Verna.

Bu Verna ini *incumbent*, jadi sudah cukup paham dengan problematikanya.

Saya pindah dulu ke meja sebelah kiri saya. Zulfikar, tadi siapa? Jadi sementara Bu Siti. Bu Siti ada? Diluar juga. Saya kembali lagi.

Pak Hamid, silakan.

#### **F-PKS (Drs. HAMID NOOR YASIN, MM):**

Terima kasih.

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

**Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi IX yang saya hormati,**

**Pak Muhammad Rifky dari KSPI beserta segenap tim dan juga Pak Wahyu Susilo dari Migrant Care serta segenap timnya yang kami hormati.**

Terima kasih sekali atas informasi dan paparan yang telah disampaikan yang tentunya dari persoalan-persoalan yang disampaikan tadi akan menghadirkan simpati dan empati dari kita terutama Anggota Komisi IX yang membidangi persoalan-persoalan ini. Hanya sayangnya waktu yang sangat terbatas sehingga kita tidak bisa mengeksplorasi seluruh persoalan-persoalan yang dihadapi oleh kawan-kawan dari KSPI maupun dari migrant care. Tetapi dari beberapa paparan tadi kami mencoba menyerap dari berbagai aspirasi tadi memang banyak persoalan-persoalan krusial yang sedang dihadapi kawan-kawan dari KSPI dan juga Migrant Care. Kami mencoba merangkum itu yang dari KNPI ada 6 persoalan utama paling tidak. Yang pertama adalah persoalan upah murah, sehingga dengan upah murah tadi menghambat hak-hak dari teman-teman buruh terutama hak mendapatkan kesehatan jasmani dan rohaninya. Ini kenapa murah itu persoalannya banyak sekali termasuk persoalan KHL tadi Pak yang mestinya komponennya banyak tetapi hanya 60 komponen tadi yang dijadikan dasar sebagai penetapan KHL sehingga upahnya sangat murah sekali.

Kemudian yang kedua adalah jaminan kesehatan terus kemudian yang ketiga adalah terkait dengan tenaga kerja *outsourcing*. Saya kebetulan Pak, setiap saat itu bergaul dengan teman-teman *outsourcing* terutama *outsourcing* charter listrik begitu Pak, pembaca meter listrik sehingga saya bisa merasakan nafas atau derita dari teman-teman yang ada di lapangan. Kebetulan kemarin banyak juga membantu di lapangan, teman-teman OS Charter itu karena mereka punya wilayah-wilayah yang menyeluruh di seluruh kabupaten.

Kemudian yang keempat adalah persoalan jaminan pensiun. Kemudian yang kelima penegakan hukum yang lemah. Jadi memang sering kita rasakan bahwa hukum ini kadang-kadang berpihak atau kadang-kadang kalau ke atas itu tumpul, ke bawah itu tajam. Ini juga persoalan yang sedang kita hadapi. Kemudian diperparah lagi seperti yang disampaikan oleh Pak Muhammad Rusdi tadi, dengan adanya kenaikan harga BBM yang dua hari yang lalu diumumkan oleh presiden dan ini akan semakin menambah derita. Tidak hanya teman-teman buruh tetapi ini seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu kami senafas

dengan teman-teman buruh bahwa kami pun juga menolak atau pemerintah, presiden dalam hal ini harus membatalkan kenaikan harga BBM karena dampaknya luar biasa. Saya setuju kalau teman-teman buruh mengadakan aksi di lapangan dalam rangka menekan persoalan ini, menyuarakan aspirasinya sehingga mudah-mudahan dengan gelombang aksi dimana-mana membuka mata hati presiden, membuka mata hati pemerintah sehingga mencabut kebijakan ini.

Kemudian berkaitan dengan persoalan-persoalan tadi, saya pikir nanti mungkin akan lebih detail, lebih teknis Komisi IX akan merumuskan rekomendasi baik itu yang terkait dengan persoalan-persoalan peraturan perundang-undangan atau legislasi, mungkin mana yang harus kita pertahankan dan mana yang kita rekomendasikan untuk dilakukan perubahan-perubahan regulasi.

Kemudian yang kedua, ini karena waktunya sangat singkat, kami juga singkat-singkat saja. Yang kedua adalah Migrant Care. Jadi persoalan migrant care ini adalah masih banyaknya kasus-kasus kekerasan dan perlakuan diskriminatif. Tadi Pak Wahyu menggambarkan bahwa kalau ada orang asing yang sebetulnya dia mendapatkan keuntungan banyak dari bangsa Indonesia, datang ke Indonesia digelar karpet merah tetapi para pahlawan-pahlawan devisa, yang membawa keuntungan dan kesejahteraan bagi bangsa, pulang-pulang bahkan dipotong, bahkan dipotong, disuruh kesana-kesini dan sebagainya, ini perlakuan-perlakuan yang tidak adil dan perlakuan-perlakuan yang tidak manusiawi. Saya rasa kami pun juga senafas dengan itu Pak, kami akan berupaya semaksimal mungkin untuk mendorong sebuah kebijakan-kebijakan yang pro dengan apa yang bapak-bapak perjuangkan. Bapak/ibu perjuangkan.

Saya rasa itu Pak Ketua. Beberapa hal, masukan dari kami. Terima kasih.

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

**KETUA RAPAT:**

***Wa'alaikumsalam.***

Terima kasih. Karena tadi saya katakan setengah satu, kita bisa perpanjang. Saya tawarkan kepada Anggota sampai jam 1 tapi final ya? Bagaimana?

**F-PKS (Drs. HAMID NOOR YASIN, MM):**

Masih ada agenda lain Pak ketua. Bahkan teman-teman inikan banyak yang tidak hadir, ada RDP di Baleg, ada RDP di BURT dan sebagainya.

**KETUA RAPAT:**

Ya, makanya kita perpanjang setengah jam lagi untuk pendalaman. Bagaimana kira-kira? Setuju ya? Bapak-bapak juga karena kita biar kita teruskan. Yang nanti mau mengiktui kegiatan yang lain tidak apa-apa, kita bisa meninggalkan. Sampai tepat jam 13.00 kita tutup.

**(RAPAT: SETUJU)**

Berikutnya dari sisi sebelah sini tadi Bu Siti ya? Bu Siti dulu, silakan.

**F-PD (SITI MUFATTAHAH, Psi):**

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

Terima kasih Pimpinan.



Terima kasih kepada tamu undangan kita baik yang dari KSPI maupun Migrant Care. Berbicara tentang buruh, mungkin tidak akan ada habisnya Pak ya. Kita selalu bertemu kemudian membahas tentang buruh dari A sampai Z permasalahan yang ada.

Kalau kita susur dari beberapa hal yang tadi disampaikan oleh KSPI, yang kaitannya dengan UMR ya Pak ya. Jadi saya setuju bapak bahwa dengan kenaikan BBM ini, ini dampaknya sangat luar biasa ke berbagai aspek kehidupan kita semua sehingga itupun berdampak kepada para buruh Pak ya. Makanya saya mendukung Pimpinan segera ini kita komunikasikan atau kita rapat, RDP dengan Kemenaker untuk membahas tentang hal ini karena memang sangat luar biasa. Mari kita evaluasi ulang mengenai UMR yang memang harus kita evaluasi sesuai dengan kondisi saat ini sehingga tadi THL yang tadinya 60 menjadi 80 dengan berbagai macam penambahan itu bisa menjadi poin-poin kita yang bisa kita sampaikan dan kita bisa diskusikan lagi dengan Kemenaker.

Selain itu juga terima kasih juga bapak telah memberikan berbagai informasi kepada kami bagaimana beratnya kehidupan buruh saat ini terutama dampak dari kenaikan BBM.

Yang kedua kaitannya dengan *outsourcing*. *Outsourcing* ya Pak ya, mungkin ini adalah momen yang tepat mungkin Pak bagi kami, kita semua bahwa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2004 yang membahas tentang di dalamnya, 2003 Pak ya, yang salah satu pasalnya membahas tentang *outsourcing*, saat ini adalah waktu yang tepat untuk kita evaluasi kembali. Kalau misalnya perlu direvisi, silakan direvisi, kita juga akan membahas itu karena mumpung Pak, Undang-Undang 2013 tahun 2003 ini produknya Ibu Megawati, iya kan Pak ya. Sekarang presidennya juga kita tahu dari PDIP. Ini momen yang tepat. Kalau memang kita butuh merevisi, silakan. Ayo kita sama-sama Komisi IX bersama dengan KSPI dan yang lainnya, elemen yang terkait di dalamnya mari kita evaluasi ulang kaitannya dengan *outsourcing*. Apakah *outsourcing* ini mau dilanjutkan atau tidak, itu kita bisa bicarakan kembali.

Kemudian kaitannya dengan *migrant care* yang kita tahu semua bahwa masalah TKI tidak henti-hentinya Pak sampai saat ini kita hadapi bersama dan kita lihat bersama karena memang salah satu kelemahan kita adalah perlindungan yang diberikan kepada TKI masih kurang. Undang-Undang yang kaitannya dengan perlindungan TKI yang sedang dibahas sampai saat ini belum selesai juga itu menjadi kendala kita semua untuk melindungi para TKI ini dimana sebenarnya isi dari undang-undang itu sudah benar-benar mengoptimalkan tentang perlindungan TKI di luar negeri. Kaitannya untuk TKI ini mungkin kita sinergikan dengan Undang-Undang PRT yang masih juga belum selesai dimana kalau kita tahu semua bahwa kalau Undang-Undang PRT ini bisa selesai dan bisa melindungi dengan baik di dalam negeri maka *insha Allah* di luar negeri pun juga kita akan diberikan perhatian khusus terhadap. Sudah 10 tahun ya saya paham, makanya mumpung ini. Mumpung, mudah-mudahan dulu kan kita tahu siapa sih yang mendukung begitu, sekarang kita minta bukti di pemerintahan saat ini dimana dulu kan sangat mendukung. Saya lihat ya sangat mendukung para teman-teman di PRT ini, Jala PRT, kita buktikan, kita minta dukungan dan kita juga dukungan dari Komisi IX yang lainnya, *insha Allah* mudah-mudahan kami sudah menetapkan ibu dan bapak, menetapkan Prolegnas tahun 2015 ini *insha Allah* salah satunya adalah berkaitan dengan Undang-Undang PRT. Tetapi bapak dan ibu, mohn maaf, itu ditetapkan belum utuh seluruh fraksi. Kami tetapkan itu oleh fraksi-fraksi yang hadir dan memang berkenan untuk tetap eksis bekerja demi rakyat ya walaupun ada ada satu kelompok tertentu yang belum hadir saat itu tapi *insha Allah* kami akan tetap berjuang untuk Undang-Undang PRT ini bisa diselesaikan. *Insha Allah*, mohon doanya ya bapak dan ibu.

Kemudian selain Undang-Undang PRT juga prolegnas yang sedang kami bidik adalah salah satunya juga tentang PT. ILN yang dimana itu revisi dari Undang-Undang 39

ya Pak ya, Undang-Undang 39 Tahun 2004 itu. Ini semua mudah-mudahan menjadi momen yang karya, karya kita di tahun 2015 ini dan saya mohon Pimpinan kita lebih cepat lagi untuk bagaimana menyelesaikan masalah buruh dan masalah TKI ini karena memang ini sampai saat ini belum terselesaikan, bertahun-tahun, puluhan tahun bahkan mungkin berapa tahun kita bisa di ini. Mumpung juga apa kita lihat menteri sudah berkenan untuk naik-naik pagar begitu ya, itukan bagian dari semangat sebetulnya. Mari kita dukung untuk bisa menyelesaikan persoalan yang kaitannya dengan buruh maupun dengan TKI.

Mungkin ini Pimpinan yang saya sampaikan. Saya mohon Pimpinan lebih *concern* lagi untuk menangani masalah buruh ini karena kami terutama kan kebetulan Pimpinan dengan saya kan sama fraksinya Pak, jadi saya bisa. Sama-sama Demokrat, jadi saya bisa colek ini Kang Dede biar lebih tapi saya yakin Kang Dede juga dulu sebagai wakil gubernur, *concern* juga dengan buruh, jadi mohon doanya. Mudah-mudahan kita bisa lebih baik ke depannya.

Terima kasih.

***Wabillahi taufiq wal hidayah.***

***Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

#### **KETUA RAPAT:**

Terima kasih Ibu Siti yang sama-sama di fraksinya tapi saya pikir kalau terkait masalah mulai buruh lalu kemudian mulai kawan-kawan pekerja, kami menyebutnya pekerja ya. Ini adalah tulang punggung negara dan tidak ada partai. Artinya bahwa ketika kita semua sudah berada dalam satu NPP Indonesia maka dia harus kita perjuangkan bersama-sama. Jadi saya nanti meng-*appeal* pada kawan-kawan ini, khusus untuk kawan-kawan pekerja buruh ini kita tidak usah melihat ini dari mana-dari mana, yang penting adalah komitmen kita memproteksi para pekerja-pekerja kita.

Saya lanjutkan kemari ke sisi sebelah sini dulu.

Pak Ali Taher.

#### **F-PAN (M. ALI TAHER):**

***Bismillahirrahmanirrahim.***

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

**Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.**

Pertama saya memberi apresiasi yang tinggi kepada saudaraku ketua komisi. Kami ini hampir setiap hari RDPU. Kemarin ada gejolak tidak terpengaruh jadi saya kira luar biasa pekerja mengagendakan pekerja-pekerja luar biasa dan mudah-mudahan menjadi amal shaleh ini.

Kemudian yang kedua saya merinding bulu saya tadi ketika Mas Muhammad Rusli menyampaikan gambaran permasalahan persoalan pekerja kita di tanah air dan itu menjadi *concern* kita untuk kita selesai. Sebelumnya saya mohon maaf, saya dari PAN, dari Banten III Tangerang Kota, Kabupaten dan Tangsel. Kebetulan sebagian besar pendukung adalah juga dari buruh dan mereka memberikan pesan wanti-wanti kepada saya, perjuangkanlah nasib buruh itu. Aslinya NTT, Nusa Tenggara Timur, maka warnanya agak beda sedikit.

#### **Saudaraku sekalian.**

Saya kira pendek saja karena waktu yang sangat terbatas ini. memperjuangkan hak itu adalah fardu 'ain, tidak boleh berhenti. Satu perbuatan baik itu lebih berarti daripada seribu cita-cita dan kalian teman-temanku ini luar biasa memperjuangkan satu nasib saja itu sudah amal shaleh yang luar biasa. Oleh karena itu landasan konstitusional kita memperjuangkan itu juga bukan tanpa dasar. Dasarnya adalah untuk mendapatkan

kepastian hukum. Perlindungan hukum, jaminan hukum, dan juga pengakuan hukum atas hak-hak dasar dari pekerja dan hak-hak dasar itu juga dituangkan dalam konstitusi kita. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat mengatakan salah satu tujuan negara adalah memajukan kesejahteraan umum. Pasal 27 juga tadi sudah bagus dikutip itu juga menjadi dasar hukum. Pasal 27 itu menjelaskan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Jelas itu.

Pasal 28D juga sudah menjelaskan dengan bagus sekali. 28D ayat (2), setiap orang berhak untuk berkerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Oleh karena itu Saudaraku sekalian, agenda-agenda yang Saudara paparkan tadi baik Mas Rudi maupun Mas Waluyo dan teman-teman seluruhnya bagus sekali. Hanya saja persoalannya itu mana yang prioritasnya. Kalau seluruhnya kalau kita kedepankan tidak tercover juga.

Oleh karena itu saya mengusulkan ketua, supaya dibuatkan ... satu, dua, tiga, mana yang *time table* nya kita bisa ikuti berdasarkan kerja kita lima tahun ini supaya bisa teragendakan dengan baik. Adapun dasar-dasar daripada tugas kita itupun sebenarnya tanpa diminta pun saudara kita akan berjuang karena itu menyangkut hak-hak dasar. Dan kepastian hukum itu menjadi sangat penting. Masa negeri yang besar ini, 17.508 pulau dari Sabang hingga Merauke, tidak ada yang tidak punya bangsa ini, seluruhnya kita punya. Yang tidak kita punya adalah kejujuran dan keteladanan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Rakyat dianggap sebagai objek, bukan sebagai subjek pembangunan. Saya menyaksikan dengan mata saya, kepala saya tidak lihat. Mata saya begitu turun dari pesawat kemudian berinteraksi dengan teman-teman yang baru pulang dari Arab Saudi, dari negara Timur Tengah itu, dibuat berjejer duduk di lantai kemudian diperiksa seperti orang yang tidak punya hak-hak, luar biasa. Jadi sebenarnya yang menghancurkan bangsa kita bukan orang lain karena kita tidak menghargai bangsa sendiri. Kalau saya ngomongin agak emosional ini. Maka ketika saya jadi direktur rumah sakit, orang-orang *cleaning service* itu yang sudah 5 tahun bekerja berturut-turut kita angkat. Karena apa? Dia memerlukan kepastian dan bagi saya *outsourcing* itu sudah hapus sajalah. Kenapa? Kan perlu ada kepastian supaya dia merancang hidupnya. Jadi kata dari Pak ... bagus, saya terharu sekali. Yang dikerjakan Cuma satu kata tadi "sejahtera". Menurut saya dua kata, "bahagia dan sejahtera". Sejahtera ukuran material, bahagia spiritual. Bahagia itu apa sih? Bahagia itu artinya orang tidak punya beban pada waktu tertentu. Jadi bahagia itu orang tidak punya beban pada waktu penting. Tadi kalau Mas ... menjelaskan bahagia orang punya ... setiap saat, itu artinya tidak bahagia apalagi sejahtera.

Saya baru lihat di dalam internet ini, kamus besar bahasa Indonesia ini. Apa itu sejahtera? Sejahtera inikan terjemahan kamus besar bahasa Indonesia, itu artinya aman sentosa. Tapi sejahtera dalam pengertian sosiologis ekonomis adalah orang tidak takut hidup hari esok, dipilih saya secara rasional. Kalau masih ada anak bangsa takut hidup hari esok. Itu artinya bangsa ini mengabaikan hak-hak dasar, membahagiakan rakyatnya, mensejahterakan rakyatnya. Oleh karena itu momentum. Saya berkali-kali mengatakan Mas Dede, momentum Komisi IX pada periode ini tidak hanya asal ngomong, kita betul-betul kita agendakan mana yang menjadi prioritas. Kalau 10 keinginan kita kejar satu atau dua saja, yang paling mungkin kita kejar. Migrant care tadi itu. Saya kira kita juga harus melakukan proteksi. Apa yang kita proteksi, kami dikasih pointers-pointers yang mana yang mesti kita kerjakan. *Insha Allah* kita disini semua *concern*. Saya hampir setiap saat rapat saya datang, ada orang tidak ada orang saya datang. Kenapa? Kami sudah dipilih rakyat, malu kalau tidak berjuang untuk rakyat.

Jadi saudaraku sekalian. Inilah pandangan sementara dari kami. Jangan sekali ini selesai, Mas Rudi, Mas Waluyo, masih ada hari esok untuk kita bekerja. Satu perbuatan baik lebih berarti daripada 1000 cita-cita. Ini dari Anita ya, seorang buruh. Umur 13 tahun

saya sudah menjadi petani di Flores, Nusa Tenggara Timur. Ini saya paham betul penderitaan Saudara, harapan Saudara adalah amanah bagi kami. Bukan berarti pilih Partai Amanat Nasional, bukan itu.

Terima kasih.

Nanti kita akan terus menerus ini ya tapi jangan malu-malu. Kalau tidak puas dengan komisi, silakan ke fraksi masing-masing supaya kita *endorse* ketua komisinya dan saya yakin Mas Dede punya *concern* yang bagus bukan hanya pernah di Demokrat, pernah juga di PAN.

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih Pak Ali Taher.

Memang Pak Ali Taher ini sahabat saya lama, memang beliau itu kalau sering keluar negeri itu suka dianggap Syeikh Arab. Jadi kalau barengan itu sama kawan-kawan TKI itu biasanya ada *space* khusus.

Saya kembali tadi sudah mendaftar Pak Zulfikar.

Silakan Pak Zulfikar.

**F-PD (Drs. H. ZULFIKAR AHMAD):**

***Bismillahirrahmanirrahim.***

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

**Salam sejahtera bagi kita.**

**Selamat siang.**

**Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat.**

**Para Saudara-Saudaraku dari KSPI dan Migrant Care.**

Perkenalkan saya, nama saya H. Zulfikar Ahmad. Saya baru periode pertama, tadi sudah disampaikan oleh Pak ketua. Kebetulan saya menjadi bupati 2 periode di Jambi. Jadi saya awal pengusaha, bupati, dan wakil rakyat sekarang. Jadi ketiganya itu saya tahu, jadi lengkap. Jadi buruh pernah juga dulu sebelum, waktu kuliah.

Jadi begini Pak. Kalau saya berbicara atas nama pengusaha, saya kebayang semuanya apa yang dibilang oleh Mas Rusli tadi, ketakutan saya. Iya, ketakutan saya. Kebetulan saya punya hotel, saya punya pabrik, saya ini menampung ... semua, ini *waterpark* saya punya, saya *real estate* ada sebelum saya menjabat bupati Pak.

Jadi dalam pemikiran saya sendiri tidak usah lagi buruh berpikir atau pegawai saya berpikir menuntut-nuntut gaji dengan saya. Ini selalu saya lakukan ini. Saya akan melihat dia bekerja, wah rajin, tentu berbeda Pak. Yang rajin, yang tidak rajin. Kalau masalah tadi UMR, itu yang ditetapkan oleh pemerintah, iya? Saya di kabupaten tentu berdasarkan kalau di Jawa Barat tentu saya berdasarkan apa yang diinikan oleh bos saya ini, wakil gubernur ini. Tentu dasarnya disitu. Provinsi lain, kabupaten lain. Buruh disebut tadi karena buruh juga disebut. Buruh yang banyak di tempat kami adalah tukang sadap karet. Jadi memburuh kepada kebun karet dia sendiri, itu yang paling banyak. Lebih kurang di kabupaten saya itu Kabupaten Bungo Provinsi Jambi, berbatasan dengan Sumatera Barat. Itu lebih kurang sekarang mungkin sudah 125.000 hektar itu masyarakat punya itu. Ada yang 4 hektar, ada yang 10 hektar, tergantung dia mau berbuat. Mau banyak ya banyak dia.

Kondisi disitu, seluruh wilayah kabupaten yang tertinggi pendapatan asli masyarakatnya itu saya. Jadi kenal saya, tiap hari jumat itu turun ke bawah menyampaikan kepada masyarakat supaya berbuatlah, ini hutan diberi oleh Tuhan, tebang banyak-banyak, dia tanam ini, saya berikan bibitnya, itu yang buruh yang paling banyak. Termasuk sawit,

sawit kurang budaya disana cuma tidak begitu banyak. Jadi masalahnya, gaji tadi untuk disana ditempatkan itu, mereka-mereka ini yang punya kebun karet, orang lain disuruh nyadap, dia bekerja, begitu Pak, itu ada. Kalau yang masih dibawah, masih anak-anak yang baru tamat SMU, tamat SMP, saya siap tampung semua itu tamat SMP, SD pun saya tampung untuk bekerja di tempat saya. Itu memang kita beri UMR. UMR saya hanya 1.300.000, *full*. Kalau di hotel siapa tadi Pak yang di hotel? Kalau di hotel itu ada lagi pendapatannya, 21%, iya pak ya? Itu dibagi. Biar GM nya sampai ke pelayan itu mendapat yang sama. Betul Pak ya? Sebab saya itu saya juga tekankan kepada GM nya. Jadi ini contoh dari pada di tempat kita.

Kembali kepada saya sebagai kepala daerah yang mantan kepala daerah, saya selalu menyampaikan kepada perusahaan, saya contohkan dengan perusahaan saya, yang dipimpin oleh anak-anak saya, itu sebagai saya contohkan seperti itu. Yang anehnya juga tenaga honor yang ada di Pemda itu kalau tidak salah saya Rp800.000 sekarang gajinya. Saya katakan, hei kenapa ini? Dibikin Perdanya Rp800.000,-? Ada dasarnya lagi. Aturan-aturan itu dan semua yang bekerja di rumah dinas saya itu. Yang buta, artinya buta, mata tebal ya Pak ya, ada yang torek, tidak kedengaran kalau bicara ini, sudah bekerja tukang cuci di rumah itu. Ada tukang sapu sudah umur 46 tahun. Saya katakan, kamu SK kamu ada tidak sampai sekian, terus menerus? Umur berapa? 46 tahun. Kamu kerja berapa? 25 tahun. Urutkan ini, saya menghadap Menteri Aparatur Negara, ini sebagai pemerintah. Itu saya angkat semua jadi pegawai negeri. Honor-honor apa yang sudah lama-lama semua saya angkat.

Sebagai Anggota Dewan sekarang, saya wakil rakyat tentu apa yang disampaikan oleh itu Pak Rusdi tadi, Pak Waluyo juga, ini menjadi pikiran saya. Pemikiran kami semua ini Anggota Dewan Komisi IX ini.

Masalah TKI Pak. Belum lama ini saya ke Hongkong, pernah saya sampaikan juga disini. Itu perlu Pak memberi pelajaran disitu. Itu kayak kata orang kami Jambi itu Pak, kayak sapi di danau, tidak tentu laki, tidak tentu perempuan itu, di Hongkong. Di Jeddah tahun 1990, saya misi perdagangan ini. Saya Ketua Sekjen Ikatan Pengusaha Muslim Indonesia, kan saya zaman dulu sudah keliling Timur Tengah, itu di Jeddah, ada yang berteriak-teriak sambil perut gede.

**KETUA RAPAT:**

Pak, waktunya kami ingatkan.

**F-PD (Drs. H. ZULFIKAR AHMAD):**

Oh iya, maaf ketua. Singkat saja. Jadi kami di Komisi IX ini siap mendukung apapun program bapak yang termasuk di akal, kalau yang tidak termasuk di akal jangan Pak, nanti perusahaannya ngamuk lagi, iya kan? Jadi pokoknya saya sudah merasakan itu. Sebagai pengusaha saya sudah merasakan, sebagai pemerintah saya merasakan dan wakil rakyat saya merasakan.

Terima kasih Pak.

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih Pak Zulfikar.

**Bapak-bapak/ibu-ibu**

Sesuai dengan kesepakatan kita bahwa kita sampai jam 13.00 siang dan paling tidak kita sudah saling bersilaturahmi untuk saling mendengarkan dan tentu banyak hal

yang kita belum selesai namun tentu nanti kita akan coba agendakan kembali, kita akan fokus. Kita bikin *focus group* ya. Yang jelas ada beberapa catatan yang kami tangkap disini. Pertama masalah KHL.

**F.PD (DRS. AYUB KHAN):**

Interupsi Pak Pimpinan.  
Mohon waktunya sedikit bisa?

**KETUA RAPAT:**

Ya, Pak Ayub mau bertanya? Mau menyampaikan?  
Oke, silakan.

**F.PD (DRS. AYUB KHAN):**

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

**Yang saya hormati Pimpinan beserta Anggota Komisi IX, dan  
Yang saya hormati pula teman-teman KSPI dan Migrant Care.**

Kami Cuma sedikit saran, semua yang disampaikan tadi termasuk rekomendasi dan paparannya saya juga sangat apresiasi kepada teman-teman semua. Cuma ada yang kita perlu kasih saran teman-teman kita berdua yang ada disini yaitu terkait masalah yang apapun yang disampaikan tadi, intinya itu adalah masalah hak-hak. Sepakat ya teman-teman ya. Tetapi kami juga mengingatkan kepada teman-teman, kita sepakat rekomendasi dan lain sebagainya, kita sepakat kita terima, kita perjuangkan seperti Pak Amin Taher tadi sampaikan, kita prioritas juga. Pokoknya semua yang masukan akan kita tindak lanjuti tetapi kami bicara masalah hak. Kita tidak akan terlepas dengan kewajiban. Kalau kita menuntut hak-hak tadi, kita juga harus kewajiban yang harus kita perbuat kita juga harus benahi, seperti itu kan begitu. Jadi hak-hak disini, kewajiban-kewajiban disini salah satunya yaitu mungkin masalah keterampilan. Keterampilan-keterampilan kita juga harus kita siapkan dengan baik khususnya baik guru-guru, baik pembantu rumah tangga maupun yang pekerja rumah tangga tadi sudah direvisi. Pekerja rumah tangga maupun yang keluar negeri agar nantinya kita juga tidak ada masalah di luar negeri khususnya kami juga banyak masukan, teman-teman kita di luar negeri itu banyak terkendala masalah administratif. Banyak juga yang membikin KTP palsu ataupun paspor juga jadi disitu alamatnya sebenarnya tinggalnya di daerah seperti kita di Jember ternyata dia berangkatnya dari luar kota. Jadi pada waktu disana meninggal, kita tidak tahu di kantor imigrasi kalau mereka sebenarnya warga kita. Itu termasuk pembenahan masalah administratif mungkin juga harus diperhatikan selain skill tadi agar nantinya apabila hak dan kewajiban ini sebanding, ini akan tercapai apa yang dikatakan Pak Amien tadi ada sejahtera dan bahagia dan agar supaya sejahtera dan bahagia, saya pikir apapun terkait masalah BBM naik ini saya pikir itu menyengsarakan kita semua. Jadi saya sepakat kita juga menolak BBM bersama-sama.

Oke, terima kasih. Saya pikir itu ketua.

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

Pak ... juga menolak kenaikan BBM.

**KETUA RAPAT:**

Saya pikir disini hampir semua menolak BBM ya karena tadi ongkos ojeg naik seribu katanya Pak, sudah mulai ramai. Tapi baiklah bapak-bapak, saya coba merangkum sedikit ya. Saya mencoba merangkum. Yang pertama adalah apa yang dimintakan kawan-kawan KSPI terkait masalah KHL, ini tentu akan kita bicarakan nanti dengan Menaker

karena klausul-klausulnya tadi terlalu kemudian bagaimana KHL itu hanya disurvei satu tahun padahal ada *high season*, ada *low season*, mungkin bisa tidak dua kali dalam satu tahun. Yang lebaran kapan, yang harga kan berbeda ya.

Kemudian juga tertarik sekali kami BPJS ini mengcover untuk buruh-buruh perkebunan. Kan selama ini sistemnya kontrak ya? Kalau buruh perkebunan sistem kontrak kemudian guru honorer ini menarik juga, PRT juga untuk mendapatkan BPJS yang dibiayai oleh negara, artinya PBI. Ini kita akan. Kalau di rumah saya memang dibiayai oleh kita tapi artinya kalau memang ada asosiasinya kah atau mungkin nanti disepakati PRT ini ke depan nanti ada undang-undangnya, saya rasa ini bisa dibiayai oleh PBI nanti tapi inikan konteksnya adalah kita berandai-andai tadi kan, 250 juta. Kita tidak usah 250 juta dulu. Para pekerja-pekerja dululah dilindungi hak-haknya karena nanti konteks dengan KHL nya kan akan menurun juga.

Kemudian perlindungan terhadap pekerja luar negeri saya pikir ini harus kita gelorakan terus, saya pikir kawan-kawan yang ada disini termasuk juga mengenai ILO 189, meratifikasi ILO. Kita belum tahu detailnya tapi nanti akan kami pelajari. Oleh karena itu izinkan saya membaca draft kesimpulan yang merupakan kesimpulan dari Rapat Komisi IX.

Yang pertama adalah Komisi IX DPR RI menyampaikan apresiasi atas masukan yang disampaikan oleh KSPI dan Migrant Care pada hari Rabu, 19 November 2014 terkait masalah ketenagakerjaan. Masukan tersebut akan menjadi masukan Komisi IX DPR RI saat rapat kerja dan rapat dengar pendapat dengan pihak-pihak terkait.

Yang kedua, Komisi IX DPR RI telah menyampaikan kepada Baleg DPR RI, RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) dan RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri menjadi RUU Prioritas tahun 2015. Mudah-mudahan tidak 10 tahun lagi bu, artinya. Ini kawan-kawan kebetulan semangatnya baru, ini masih *fresh*. Kenapa bu? Tiga tahapnya kebetulan ini bukan kita. Jadi kita akan coba ini kita jadikan prioritas kembali. Saya teruskan ya?

Lalu ketiga, Komisi IX DPR RI akan melakukan koordinasi dengan Komisi VI DPR RI terkait permasalahan pekerja *outsourcing* di Perusahaan BUMN karena saya lihat ini agenda berkali-kali dengan Menteri BUMN tidak selesai-selesai. Rupanya Menteri BUMN ini memang domainnya Komisi IX. Jadi kami atau Pimpinan akan segera berkoordinasi dengan Komisi VI. Kalau tidak mempan juga kita akan datang ke Pimpinan DPR. Kalau tidak mempan juga mungkin menggunakan hak daripada DPR itu sendiri tapi intinya ini harus kita tindak lanjuti.

**F-PKS (ANSORY SIREGAR):**

**Pimpinan.**

Sedikit saja untuk nomor tiga ini.

**KETUA RAPAT:**

Silakan.

**F-PKS (ANSHORY SIREGAR):**

Jadi waktu kemarin kita memanggil Dahlan Iskhan itu berkali-kali sampai kita ini memanggil dengan polisi sehingga kita dari Komisi IX ada yang naik ojeg, ada yang langsung ke rumahnya pagi-pagi untuk memaksa dia kesini begitu. Maka kenapa kita buat ada interpelasi hak angket dan hak menyatakan pendapat di pasal yang mau dihapus kemarin itu, gara-gara itu begitu. Kenapa ada pasal itu? Gara-gara Dahlan Iskhan, waktu itu *outsourcing* kita sangat paksa untuk dihapus tapi tidak berhasil tapi kita tunggulah nanti

bahwa salah satu rekomendasi PDIP, kan kalau tidak salah yang paling getol untuk memaksa dia kesini PDIP, waktu itu Bu Ning, dengan kita lagi ya, kita sudah rapat begitu ya. Jadi kenapa ada pasal itu, tapi tidak tahu sudah getol kemarin dia itu untuk memaksa ini sekarang yang paling getol dia juga untuk menghapusnya. Saya juga bingung juga karena untuk dalam rapat, dalam di Undang-Undang MD3 itu yang paling juga untuk mengitu ya mereka juga waktu itu sebelumnya ya? Jadi ini kok dihapus begitu tapi kita sudah dihapus tidak apa-apalah toh masih ada juga di paripurna begitu ya. Jadi ini nomor 3 ini, ini sangat penting untuk kita suarakan terus agar melalui ketua nanti, agar Pak ketua bisa kita dorong ketua semuanya. Pak ... dengan Pak Pimpinan yang lainnya agar *outsourcing* ini kalau bisa setahun-dua tahun ini biar sudah terhapus karena ini sangat menyengsarakan dan penderitaan buat buruh. Kemudian juga sudah rekomendasi Rapimnas PDIP, *outsourcing* dihapus, ini harus kita dorong terus. Jadi ini selalu kita suarakan agar pemerintah juga benar-benar menghapus kebijakan yang tidak manusiawi.

Terima kasih Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih Pak Anshori.

Memang kalau dulu menterinya Dahlan Iskhan. Sekarang menterinya Ibu Rini Sumarno. Nanti kawan-kawan Fraksi PDIP kan akan bergabung dengan kita, kita minta beliau nanti juga untuk mendorong agar memperkuat posisi ini dan perlu diketahui oleh teman-teman bahwa semangatnya sama, kita semangatnya sama agar kita menghapuskan *outsourcing* di BUMN.

Saya kembalikan kepada Anggota, dari tiga hal ini ada yang mau ditambahkan? Mau dikoreksi, silakan.

**SEKJEN KSPI (MUHAMAD RUSDI):**

**Pimpinan !**

**KETUA RAPAT:**

Ya Pak Rusdi.

**SEKJEN KSPI:**

Buat kami, tadi kalau ditanya apa .... dari teman-teman buruh maka yang menjadi prioritas adalah upah. Upah buat buruh adalah jantungnya perjuangan, jantungnya kehidupan buruh. Upah tadi kan kita sepakat bahwasanya ada sesuatu yang perlu dikaji tentang upah minimum, tuntutan KHL maka kami berharap klausul mengenai KHL ini dari Komisi IX juga menjadi sebuah catatan rapat hari ini apakah nanti mendesak atau minimal adalah mengkaji ulang, meminta pemerintah untuk mengkaji ulang tentang perhitungan UMP dan KHL, itu yang menjadi sebuah catatan buat kami sehingga karena memang dalam buruh kalau buat isunya upah itu sudah yang turun dulu bisa jutaan, hampir di semua provinsi. Ini kami berharap kalau ditanya prioritas maka Pak Ali Taher, upah ini harus kami meminta untuk bisa dimasukkan agar setiap tahunnya itu minimal demo-demo itu bisa berkurang terkait dengan upah tadi.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih.



Ditambahkan saja sedikit, di poin satu itu adalah Komisi IX DPR RI menyampaikan apresiasi atas masukan yang disampaikan oleh KSPI dan Migrant Care pada hari Rabu terkait masalah ketenagakerjaan. Masukan tersebut akan menjadi masukan Komisi IX DPR RI saat rapat kerja dan rapat dengar pendapat dengan pihak-pihak terkait. Ini konteksnya sebetulnya semua yang kita dengar barusan itu. Artinya data ini nanti begitu kami panggil Pak Menteri yang sudah dua kali belum mau hadir ini, mudah-mudahan nanti hadir. Nanti kita akan tekankan ini masalah KHL, BJPS kesehatan termasuk juga dan yang lain begitu. Setuju tidak bapak? Inikan referensi kita, semua sudah kita catat. Oke, yang pertama setuju ya? Bagaimana?

**(RAPAT: SETUJU)**

Lalu yang kedua adalah Komisi IX DPR menyampaikan kepada Baleg DPR RI RUU, "telah menyampaikan" maaf, "telah" kemarin, kami sudah tanda tanganti tentang perlindungan pekerja rumah tangga dan RUU PPILN (Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja) sehingga apa yang sudah disampaikan kawan-kawan Migrant Care, nanti akan kita jadikan prioritas, kita akan bedah kembali. Ini bisa disetujui? Bapak dari Migrant Care, setuju?

**(RAPAT: SETUJU)**

Dan yang terakhir, Komisi IX DPR RI akan melakukan koordinasi dengan Komisi VI DPR RI terkait permasalahan pekerja *outsourcing* di Perusahaan BUMN. Dapat setuju? Setuju ya.

**(RAPAT: SETUJU)**

Terima kasih. Dengan demikian draft kesimpulan akan segera dijadikan kesimpulan rapat dan nanti ditanda tangani oleh kami.

Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya.

**KSPI:**

Sebelum ditutup Pak, masih boleh Pak, sedikit saja.

Tiga menit saja.

Terima kasih.

Jadi begini Pak. Seperti tadi kami sampaikan juga kepada Pimpinan MPR kemarin bahwa untuk meyakinkan berbagai pihak akan perjuangan kami tentang upah yang layak, itu karena ini menyangkut juga masalah pertumbuhan ekonomi Pak disamping kesejahteraan bagi yang bersangkutan tetapi juga dengan adanya kekuatan daya beli yang meningkat itu karena merupakan sumbangan untuk pembangunan ekonomi setempat paling tidak. Jadi dengan, mereka sanggup membeli barang-barang yang ada di sekitar mereka, produsen pabrik-pabrik itu akan bisa dibeli hasilnya sebab kalau buruh miskin, tidak ada yang akan mau membeli barang-barang itu Pak. Contoh banyak, yang kalau serikat pekerja kuat pasti negaranya makmur, itu satu.

Kedua, yang kita inginkan seperti yang disampaikan oleh bapak tadi yaitu sejahtera dan bahagia. Itu penting Pak sebab kalau sejahtera saja itu Singapura rangkingnya tinggi, Malaysia tinggi tapi dari segi kebahagiaan mereka jauh dibawah, Indonesia jauh lebih tinggi.

Jadi itu saja.

Terima kasih Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Baik Pak.

**KSPI (EDISON):**

**Pimpinan Sidang.**

**KETUA RAPAT:**

Ya, silakan.

**KSPI (EDISON):**

Bisa menambahi sedikit?

Terima kasih.

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

Nama saya Edison, kebetulan saya juga pekerja hotel karena dari pariwisata. Ada satu uneg-uneg yang perlu kami sampaikan disini dalam kesempatan yang baik ini. Adapun uneg-unegnya adalah bahwa berkaitan dengan kebijakan presiden untuk melarang kementerian atau pemerintah itu rapat di hotel. Itu sudah ada dampak Pak. Untuk hotel daerah wisata kemungkinan tidak berpengaruh tapi kalau hotel di kawasan kota dan juga yang koor bisnisnya adalah mess, itu kena Pak. Salah satu contohnya di kawasan Puncak sudah ada hampir 15 event kegiatan di bulan Desember itu dicancel karena itu yang berakibat apa? Yang berakibat adalah pem-PHK-an pekerja, ini akan terjadi pem-PHK-an pekerja. Yang jelas ini mohon menjadi satu rekomendasi juga di Komisi IX untuk mempertanyakan kebijakan itu. Mungkin itu saja.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih Pak.

Saya bisa pahami Pak. Di Bandung itu hotel makin banyak ternyata bukan karena kunjungannya banyak. Karena kunjungan itu hanya jumat, sabtu, minggu. Senin sampai kamis nya itu rapat. Jadi itu memang dilakukan pemerintah atau BUMN. Jadi memang beberapa teman-teman dari sektor pariwisata menyampaikan pemasukan bisa berkurang 40% sampai 50%. Tetapi domain kami di Komisi IX bukanlah sektor pariwisata. Mudah-mudahan tidak terjadi PHK. Ini nanti domainnya ini mungkin di MenPAN, Kemenpan, karena terkait dengan pemberdayaan aparatur negara. Tentu kita akan menyatakan satu keberatan agar mencegah agar jangan sampai terjadi pem-PHK-an, kalau sudah PHK baru biasanya disini tapi sebelum terjadi kita akan. Kami tidak bisa memasukkan rekomendasi karena belum konteksnya kepada Komisi IX tapi ini sudah menjadi catatan bagi kami. Bisa dipahami Pak ya? Baik, terima kasih.

Sudah ya.

Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada KSPI. Sampaikan salam hormat pada Pak Said Iqbal, mungkin tadi kehabisan BBM di jalan Pak ya juga teman-teman dari Migrant Care, Ibu *from Work Free, thank you very much* dan juga teman-teman yang lain sudah memberikan pencerahan kepada kami semua. Jangan kapok kalau nanti kami undang lagi RDPU ya karena kami ingin melakukan pendalaman terus. Juga terima kasih kepada teman-teman Anggota Komisi IX, wajahnya tampak semangat semua apalagi kami sudah mendapat dukungan dari Ibu Nasdem ya bu ya? Dari Nasdem, PPP sudah. Dengan ibu juga, ini menambah semangat lagi. Mudah-mudahan ke depan Komisi IX bisa berbuat lebih banyak buat rakyat kita.

Akhir kata saya mohon izin kepada bapak-bapak dan ibu-ibu semua.

Sebelum saya tutup, saya serahkan kepada Ketua KSPI untuk memberikan satu *statement* terakhir.

Silakan.

**SEKJEN KSPI:**

Terima kasih atas kesempatan luar biasa ini dan kami juga tadi melihat dari *statement-statement* yang ada dari bapak/ibu Dewan yang terhormat. Ini adalah sebuah semangat yang baru. Semoga tadi kita semua juga punya perasaan yang sama, punya rasional yang sama dan juga kita merasa bukan hanya rasional tapi juga hati yang sama Pak karena kalau Cuma tidak bisa diterima akal, kami berharap juga DPR punya hati. Banyak orang pintar tetapi tidak punya hati Pak. Ahok pintar Pak tapi tidak punya hati Pak. Kami berharap kita satu saf yang sama dan satu hati yang sama.

Terima kasih atas sambutan dan *statement* serta komitmen yang sama terhadap bagaimana membangun kesejahteraan buat buruh dan rakyat Indonesia. Terima kasih.

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

**KETUA RAPAT:**

Pak Wahyu, silakan.

**MIGRANT CARE (WAHYU SUSILO):**

Terima kasih kepada bapak Pimpinan Komisi IX dan Anggota Komisi IX. Migrant Care juga akan terus mengawal bersama-sama teman-teman di DPR kinerja dari pemerintah dalam rangka perlindungan buruh migran. Kita ingin menagih janji bahwa negara akan hadir pada mereka yang sedang ada di luar negeri, tidak menghindar. Saya kira itu.

Terima kasih.

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih Pak.

Kita akan kawal bersama-sama, malah kita di Komisi IX ini kita diizinkan kita melakukan Kunker spesifik nantinya ke daerah-daerah. Bapak tinggal arahkan saja kemana yang perlu kita datang sehingga kita nanti siapkan dalam rangkaian reses atau kunjungan kerja kita.

Dan akhir kata, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Syukur *alhamdulillah* dan rapat saya tutup dengan membaca *hamdallah*.

**(RAPAT DITUTUP PUKUL 13.20 WIB)**

**a.n. KETUA RAPAT  
SEKRETARIS RAPAT,**

**DRA. TRI UDIARTININGRUM**